BGK FOUNDATION

2025

LAPORAN TAHUNAN



ANALISA PRAKTIK PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN, SOSIAL, DAN TATA KELOLA (LST) PERUSAHAAN NASIONAL PERIODE 2024





DAFTAR ISI

3 Kata Pengantar

6 Ringkasan Eksekutif

18 Tujuan

20 Metodologi

24 Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Laporan Keberlanjutan dari Periode Tahun Fiskal

28 Hasil dan Analisa Pengungkapan 33 Faktor LST Emiten

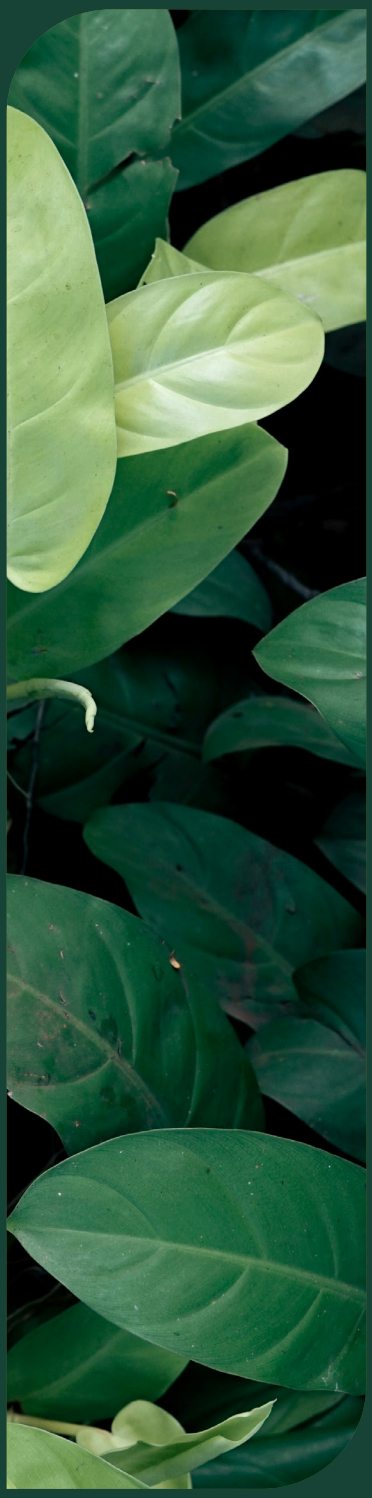
48 Indeks ESG BGK Foundation

50 Pemetaan LST dan SDGs

54 Rekomendasi

60 Penutup





KATA PENGANTAR



Deni Daruri
Founder BGK Foundation

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga BGK Foundation dapat menyelesaikan laporan tahunan: Analisis Praktik Pengungkapan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) Perusahaan Nasional Periode 2024. Laporan ini merupakan penerbitan keenam sejak berdirinya BGK Foundation pada 2019, sekaligus mencerminkan komitmen kami untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui riset yang mendukung peningkatan kualitas pengungkapan keberlanjutan perusahaan nasional.

BGK Foundation adalah organisasi independen yang hadir dengan keyakinan bahwa kemajuan dunia usaha perlu berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Keanggotaan dalam Global Reporting Initiative (GRI) dan International Financial Reporting Standards (IFRS) *Sustainability Alliance* memperkuat keterlibatan kami dalam jejaring global serta pemahaman atas perkembangan standar internasional sebagai landasan pengembangan riset dan analisis keberlanjutan.

Bagi kami, laporan keuangan dan laporan keberlanjutan ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi dalam menggambarkan nilai perusahaan saat ini dan prospeknya di masa depan. Laporan keuangan memberikan gambaran kinerja dan posisi keuangan, sementara laporan keberlanjutan memperluas pemahaman atas pengelolaan dampak, risiko, dan peluang LST. Kualitas informasi pada keduanya membantu pemangku kepentingan menilai kemampuan perusahaan dalam menciptakan dan mempertahankan nilai secara berkelanjutan.

Karena itu, pengungkapan keberlanjutan merupakan bagian dari tanggung jawab kepemimpinan. Informasi yang relevan, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi dasar untuk membangun kepercayaan dan mendukung pengambilan keputusan. Kualitas pelaporan perlu ditopang oleh tata kelola yang kuat, keandalan data, serta konsistensi antara komitmen dan pelaksanaan.

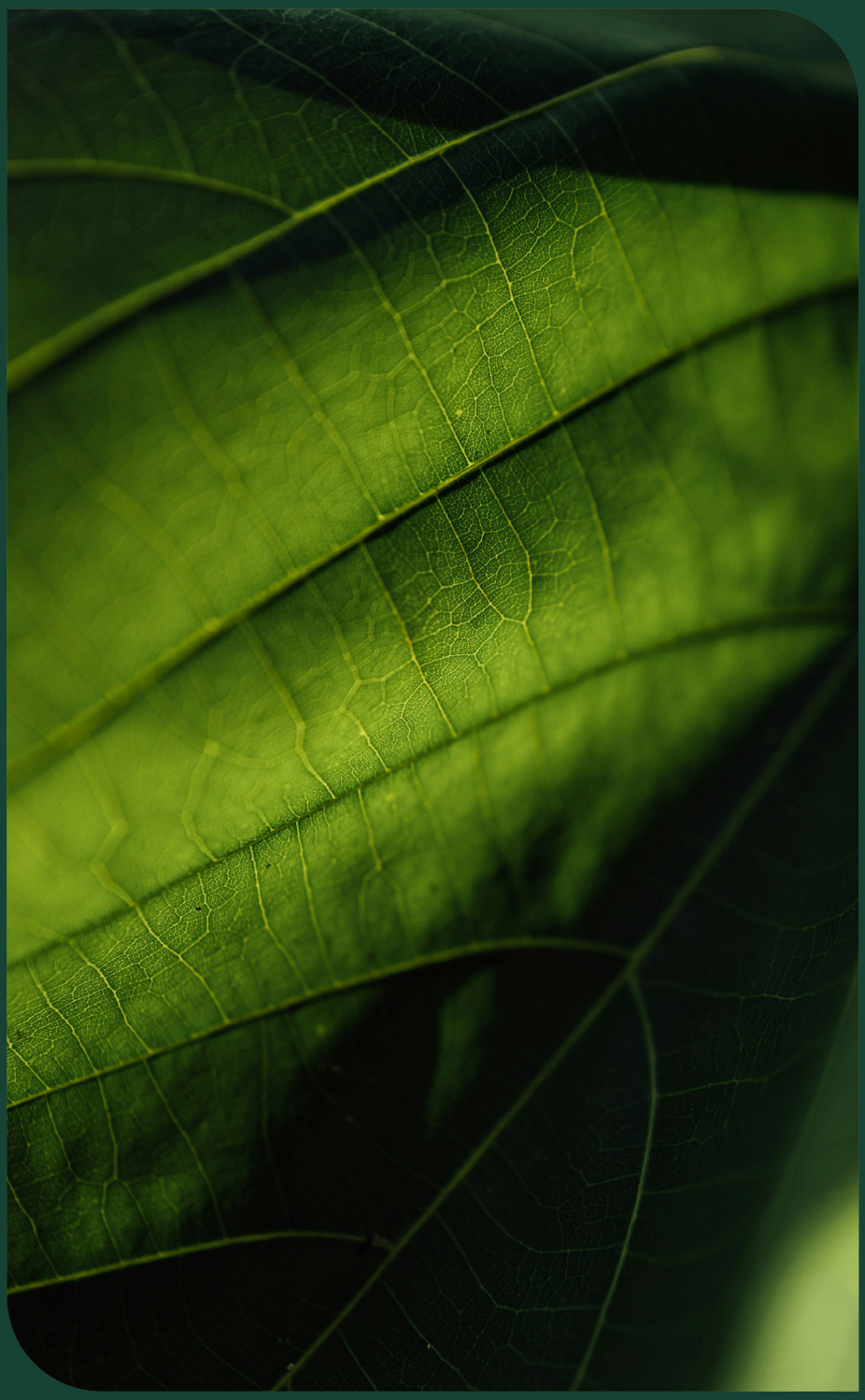
Analisis dalam laporan ini menggunakan 33 faktor ESG BGK Foundation, yang mencakup masing-masing 11 faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola. Kerangka ini dikembangkan melalui riset atas praktik pengungkapan ESG di pasar modal global, termasuk Nasdaq Helsinki, London Stock Exchange, dan Hong Kong Stock Exchange. Pengembangannya turut mempertimbangkan ketentuan pelaporan nasional serta berbagai standar dan kerangka internasional, seperti GRI Standards, IFRS S1 dan IFRS S2, SASB Standards, CDP, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kriteria lembaga pemeringkat ESG internasional juga menjadi pertimbangan agar hasil analisis relevan bagi peningkatan mutu pelaporan dan kesiapan perusahaan dalam mengikuti penilaian ESG.

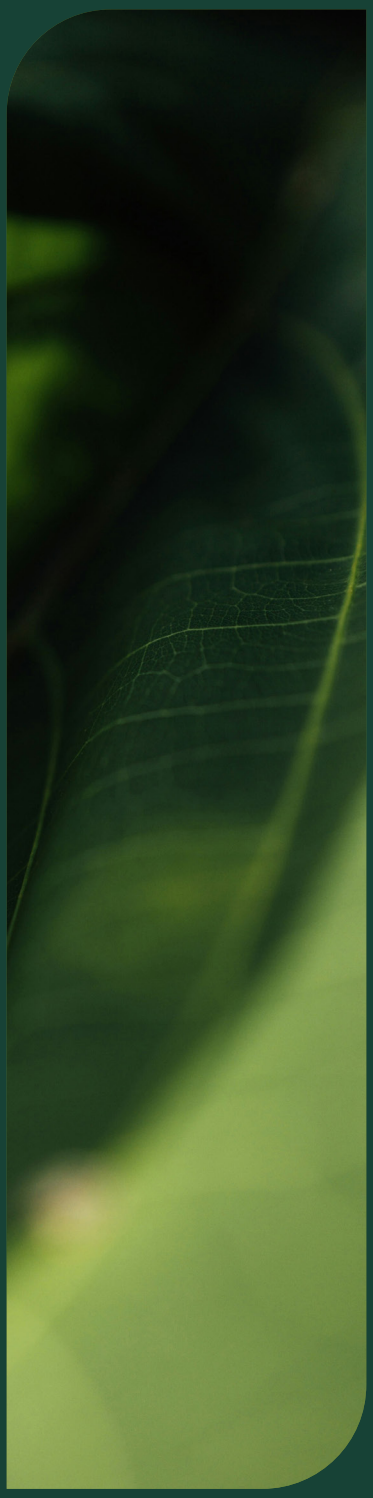
Perkembangan regulasi dan standar semakin memperjelas arah pelaporan nasional. Pengesahan Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan PSPK 2, yang merujuk pada IFRS S1 dan IFRS S2 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2027, menjadi tonggak penting dalam pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan dan iklim. Sejalan dengan itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) sebagai perubahan atas POJK Nomor 51/POJK.03/2017 untuk memperkuat penerapan keuangan berkelanjutan dan menyelaraskan pengungkapan dengan kedua standar tersebut.

Pembaruan komitmen iklim Indonesia melalui *Second Nationally Determined Contribution* (Second NDC) untuk periode 2031–2035, serta arah menuju emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat, turut memperkuat urgensi tersebut. Kontribusi dunia usaha melalui pengelolaan emisi, mitigasi, dan adaptasi perlu didukung data andal serta evaluasi kemajuan yang konsisten.

Melalui laporan ini, kami berharap hasil analisis yang disajikan dapat menjadi rujukan bagi perusahaan untuk mengidentifikasi kesenjangan, menetapkan prioritas perbaikan, dan meningkatkan mutu pelaporan. Laporan ini juga diharapkan membuka ruang dialog dan pembelajaran bersama. Dalam semangat yang sama, BGK Foundation memberikan apresiasi melalui *Indonesia ESG Leadership Awards* untuk mendukung konsistensi perusahaan dalam meningkatkan kualitas pengungkapan keberlanjutan.

Akhir kata, BGK Foundation akan terus berkontribusi melalui riset dan kolaborasi untuk memperkuat praktik keberlanjutan di Indonesia. Semoga kemajuan dalam pengungkapan berjalan seiring dengan peningkatan kinerja LST perusahaan yang memberikan manfaat nyata bagi lingkungan, masyarakat, dan perekonomian nasional.





RINGKASAN EKSEKUTIF

BGK Foundation telah menyelesaikan evaluasi mendalam atas pengungkapan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dalam laporan keberlanjutan perusahaan nasional. Evaluasi ini dilakukan dengan mengacu pada pedoman 33 Faktor Materialitas LST yang dikembangkan oleh BGK Foundation, memastikan bahwa setiap aspek material yang relevan dengan keberlanjutan perusahaan dapat diidentifikasi dan dianalisis secara komprehensif.

Dalam melakukan evaluasi pengungkapan LST, BGK Foundation menganalisa laporan keberlanjutan untuk tahun finansial yang berakhir pada 31 Desember 2024. Laporan-laporan tersebut diterbitkan oleh 148 perusahaan yang diambil berdasarkan publikasi laporan keberlanjutan dari *website official* masing-masing. Periode penerbitan laporan keberlanjutan yang masuk dalam kriteria penilaian adalah laporan yang terbit antara bulan Januari - September 2025.

Adapun 148 perusahaan yang dilakukan penilaian terdiri dari 125 emiten (38 emiten LQ45) dan 23 perusahaan non-emiten dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan	ESG Disclosure (%)	Keterangan
1	ITMG	PT Indo Tambangraya Megah Tbk	97%	LQ45
2	ABMM	PT ABM Investama Tbk	96%	
3	PTBA	PT Bukit Asam Tbk	96%	LQ45
4	BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	95%	LQ45
5	TINS	PT Timah Tbk	94%	
6	ANTM	PT Aneka Tambang Tbk	92%	LQ45
7	PGEO	PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	91%	LQ45
8	BBTN	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	91%	LQ45
9	WTON	PT Wijaya Karya Beton Tbk	91%	
10	BMRI	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	91%	LQ45
11	BJBR	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	90%	
12	BBNI	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	90%	LQ45
13	INCO	PT Vale Indonesia Tbk	90%	LQ45
14	PGAS	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	90%	LQ45
15	POWR	PT Cikarang Listrindo Tbk	88%	
16	ASII	PT Astra International Tbk	86%	LQ45
17	ISAT	PT Indosat Tbk	86%	LQ45
18	ANJT	PT Austindo Nusantara Jaya Tbk	85%	
19	BUMI	PT Bumi Resources Tbk	85%	LQ45
20	WEGE	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	85%	
21	INDY	PT Indika Energy Tbk	83%	
22	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk	82%	LQ45
23	MBMA	PT Merdeka Battery Materials Tbk	82%	LQ45

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan	ESG Disclosure (%)	Keterangan
24	MEDC	PT Medco Energi Internasional Tbk	81%	LQ45
25	BTPN	PT Bank BTPN Tbk / Bank SMBC Indonesia	79%	
26	CITA	PT Cita Mineral Investindo Tbk	79%	
27	BRIS	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	78%	
28	MDKA	PT Merdeka Copper Gold Tbk	77%	LQ45
29	WIKA	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	75%	
30	GIAA	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	74%	
31	PTRO	PT Petrosea Tbk	74%	
32	EMTK	PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	73%	LQ45
33	JSMR	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	73%	
34	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	73%	LQ45
35	SMCB	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	71%	
36	BJTM	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	71%	
37	BRMS	PT Bumi Resources Minerals Tbk	71%	
38	NCKL	PT Trimegah Bangun Persada Tbk	69%	LQ45
39	BNGA	PT Bank CIMB Niaga Tbk	67%	
40	DEWA	PT Darma Henwa Tbk	67%	
41	TOWR	PT Sarana Menara Nusantara Tbk	66%	LQ45
42	SIDO	PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk	65%	
43	DSSA	PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	63%	LQ45
44	TLKM	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	61%	LQ45
45	DSNG	PT Dharma Satya Nusantara Tbk	59%	
46	PTPP	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	58%	
47	BBCA	PT Bank Central Asia Tbk	53%	LQ45
48	BDMN	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	51%	
49	TBIG	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	48%	
50	ADMR	PT Adaro Minerals Indonesia Tbk	46%	LQ45
51	TOBA	PT TBS Energi Utama Tbk	45%	
52	TPIA	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	45%	
53	AALI	PT Astra Agro Lestari Tbk	43%	
54	SMGR	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	42%	LQ45
55	GOTO	PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	41%	LQ45
56	EXCL	PT XL Axiata Tbk	40%	LQ45
57	DOID	PT Delta Dunia Makmur Tbk	40%	
58	SSMS	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	40%	
59	ELSA	PT Elnusa Tbk	39%	
60	BIRD	PT Blue Bird Tbk	37%	

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan	ESG Disclosure (%)	Keterangan
61	ADRO	PT Adaro Energy Indonesia Tbk	37%	LQ45
62	STAA	PT Sumber Tani Agung Resources Tbk	36%	
63	JAWA	PT Jaya Agra Wattie Tbk	36%	
64	PSGO	PT Palma Serasih Tbk	34%	
65	INTP	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	33%	
66	JPFA	PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk	33%	LQ45
67	AKRA	PT AKR Corporindo Tbk	33%	LQ45
68	INPC	PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	33%	
69	SMRA	PT Summarecon Agung Tbk	33%	
70	BNII	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	32%	
71	MEGA	PT Bank Mega Tbk	31%	
72	SCMA	PT Surya Citra Media Tbk	31%	LQ45
73	PWON	PT Pakuwon Jati Tbk	31%	
74	BSDE	PT Bumi Serpong Damai Tbk	31%	
75	HRUM	PT Harum Energy Tbk	31%	
76	PJAA	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk	31%	
77	ADHI	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	31%	
78	TAPG	PT Triputra Agro Persada Tbk	31%	
79	ARCI	PT Archi Indonesia Tbk	31%	
80	AMRT	PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	31%	LQ45
81	LPKR	PT Lippo Karawaci Tbk	30%	
82	BTPS	PT Bank BTPN Syariah Tbk	30%	
83	META	PT Nusantara Infrastructure Tbk	30%	
84	BANK	PT Bank Aladin Syariah Tbk	30%	
85	KAEF	PT Kimia Farma Tbk	29%	
86	MERK	PT Merck Tbk	29%	
87	INPP	PT Indonesian Paradise Property Tbk	29%	
88	AGII	PT Samator Indo Gas Tbk D/H PT Aneka Gas Tbk	29%	
89	SRTG	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	28%	
90	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk	28%	LQ45
91	CRSN	PT Carsurin Tbk	28%	
92	NISP	PT Bank OCBC NISP Tbk	28%	
93	IPCM	PT Jasa Armada Indonesia Tbk	27%	
94	TOTL	PT Total Bangun Persada Tbk	27%	
95	ARTO	PT Bank Jago Tbk	27%	
96	ACES	PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk	27%	LQ45
97	ASGR	PT Astra Graphia Tbk	26%	

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan	ESG Disclosure (%)	Keterangan
98	UNTR	PT United Tractors Tbk	25%	LQ45
99	LPIN	PT Multi Prima Sejahtera Tbk	25%	
100	AGRO	PT Bank Raya Indonesia Tbk	24%	
101	KRAS	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	23%	
102	BRAM	PT Indo Kordsa Tbk	23%	
103	PPRO	PT PP Properti Tbk	22%	
104	PSSI	PT IMC Pelita Logistik Tbk	22%	
105	MYOR	PT Mayora Indah Tbk	22%	
106	ISSP	PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk	21%	
107	PNBN	PT Bank Pan Indonesia Tbk	21%	
108	IBST	PT Inti Bangun Sejahtera Tbk	20%	
109	ADMF	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	20%	
110	BTON	PT Betonjaya Manunggal Tbk	20%	
111	LPLI	PT Star Pasific Tbk	20%	
112	COCO	PT Wahana Interfood Nusantara Tbk	18%	
113	MAYA	PT Bank Mayapada Internasional Tbk	18%	
114	CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	18%	LQ45
115	CSRA	PT Cisadane Sawit Raya Tbk	18%	
116	IPCC	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	18%	
117	BUKA	PT Bukalapak.com Tbk	17%	
118	WSKT	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	16%	
119	HMSP	PT HM Sampoerna Tbk	15%	
120	INAF	PT Indofarma Tbk	12%	
121	AMMN	PT Amman Mineral Internasional Tbk	12%	LQ45
122	KEEN	PT Kencana Energi Lestari Tbk	11%	
123	BBMD	PT Bank Mestika Dharma Tbk	10%	
124	ADES	PT Akasha Wira International Tbk	10%	
125	BEKS	PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	8%	
126	Private Company	PT Pertamina (Persero)	96%	
127	Private Company	PT Pupuk Kalimantan Timur	96%	
128	Private Company	PT Pupuk Indonesia (Persero)	95%	
129	Private Company	PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)	91%	
130	Private Company	PT Kilang Pertamina Internasional	89%	
131	Private Company	PT Indonesia Asahan Aluminium	88%	
132	Private Company	PT Perkebunan Nusantara I (Persero)	86%	
133	Private Company	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	86%	
134	Private Company	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	85%	

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan	ESG Disclosure (%)	Keterangan
135	Private Company	PT PLN Nusantara Power	81%	
136	Private Company	PT PLN Indonesia Power	78%	
137	Private Company	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	77%	
138	Private Company	PT Angkasa Pura Indonesia (Persero)	75%	
139	Private Company	PT Hutama Karya (Persero)	43%	
140	Private Company	PT Perum Peruri (Persero)	40%	
141	Private Company	PT Federal International Finance	33%	
142	Private Company	PT Pegadaian (Persero)	32%	
143	Private Company	Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	30%	
144	Private Company	PT Permodalan Nasional Madani	28%	
145	Private Company	PT Prudential Life Assurance	26%	
146	Private Company	PT Asuransi Jasa Indonesia	22%	
147	Private Company	Bank Aceh Syariah	20%	
148	Private Company	PT Bank DKI	18%	

Evaluasi dan penilaian pengungkapan LST setiap perusahaan berfokus pada faktor-faktor sebagai berikut:

- Apakah perusahaan telah menerbitkan laporan keberlanjutan;
- Kapan laporan keberlanjutan diterbitkan;
- Apakah laporan keberlanjutan telah melalui proses *assurance* oleh pihak ketiga independen (AA1000 atau ISAE3000);
- Pengungkapan dari perusahaan berdasarkan penilaian 33 faktor LST;
- Bagaimana perusahaan mempersiapkan laporan keberlanjutan dan seberapa detail informasi yang diungkapkan dalam laporan, serta kesesuaian laporan dengan standar *Global Reporting Initiative* (GRI).

Komponen penilaian atas pengungkapan topik lingkungan, sosial, dan tata kelola pada laporan keberlanjutan mencakup:



Lingkungan

- Emisi GRK (E1)
- Intensitas GRK (E2)
- Konsumsi energi (E3)
- Intensitas energi (E4)
- Energi *mix* (E5)
- Konsumsi air (E6)
- Peraturan, Prosedur dan Proses (PPP) mengenai lingkungan (E7)
- Pengawasan Dewan Direksi lingkungan (E8)
- Pengawasan manajemen senior lingkungan (E9)
- Pengelolaan dan analisa investasi kepada iklim dan lingkungan (E10)
- Tanggung jawab sosial perusahaan / *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Perhutanan (E11)

GRI Utama : **20** GRI Indikator : **76** GRI Sub Indikator : **33**



Sosial

- Perbandingan gaji CEO (S1)
- Perbandingan gaji antar *gender* (S2)
- Persentase pergantian karyawan (S3)
- Persentase keberagaman *gender* (S4)
- Persentase pekerja sementara (S5)
- PPP non-diskriminasi (S6)
- Angka cedera/kecelakaan (S7)
- Tingkat kesehatan dan keselamatan dalam lapangan pekerjaan (S8)
- Pekerja anak / pekerja paksa (S9)
- PPP hak asasi manusia (S10)
- CSR di komunikasi masyarakat (S11)

GRI Utama : **22** GRI Indikator : **51** GRI Sub Indikator : **39**



Tata Kelola

- Keberagaman anggota Dewan (G1)
- Kemandirian Dewan dari kendali pihak lain (G2)
- Dorongan moneter yang terkait dengan *sustainability* (G3)
- Protokol dan perjanjian perundingan bersama (G4)
- Kode Etik Pihak Ketiga (G5)
- Etika dan kepatuhan hukum anti – korupsi (G6)
- Privasi dan perlindungan data pribadi (G7)
- *Sustainability Reports* (G8)
- Mekanisme *disclosure* (G9)
- Jaminan Independen (*Independent Assurance*) (G10)
- Transparansi pajak (G11)

GRI Utama : **36** GRI Indikator : **66** GRI Sub Indikator : **33**

Dengan memasukkan komponen-komponen di atas dalam penilaian, setiap laporan keberlanjutan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana perusahaan berkomitmen dan berkontribusi terhadap tujuan keberlanjutan global, serta dampaknya terhadap kinerja jangka panjang perusahaan dan pemangku kepentingan.

Rekomendasi kami berfokus pada:

a. Pengungkapan terkait faktor GHG *Emission;*
b. Penggunaan pilihan "jelaskan" untuk ketentuan-ketentuan yang di bawahi aturan "patuhi, jika tidak jelaskan alasan";
c. Proses *assurance* laporan keberlanjutan oleh pihak ketiga independen;
d. Keterlibatan tata kelola tertinggi terkait isu LST;
e. Tuntunan dan pengawasan kepada perusahaan.

Penjelasan terkait komponen LST BGK Foundation dapat dilihat dalam tabel berikut:

Komponen LST	Faktor LST	Penjelasan
Lingkungan	E1 - Emisi GRK (GHG *Emissions*)	Merupakan emisi gas rumah kaca yang berasal dari penggunaan BBM, listrik, freon, pupuk, kebakaran hutan, dan yang lainnya. Terdiri dari: • *Scope* 1 : Emisi yang dihasilkan dari operasional perusahaan seperti BBM, freon, pupuk. • *Scope* 2 : Emisi yang dihasilkan dari listrik. • *Scope* 3 : Emisi yang dihasilkan dari perjalanan bisnis, produk atau jasa yang dibeli, dan limbah.
	E2 - Intensitas GRK (GHG *Intensity*)	Untuk menghitung efisiensi sumber daya organisasi relatif terhadap nilai ekonomi. Dengan membagi emisi tahunan (pembilang) dengan berbagai ukuran *output* ekonomi (penyebut).
	E3 - Konsumsi Energi (*Energy Usage*)	Rekapitulasi penggunaan energi seperti penggunaan BBM, listrik, freon, dan yang lainnya.

Komponen LST	Faktor LST	Penjelasan
	E4 – Intensitas Energi (*Energy Intensity*)	Untuk menghitung konsumsi sumber daya organisasi relatif terhadap praktik penggunaan. Dengan membagi konsumsi tahunan (pembilang) dengan berbagai ukuran skala fisik (penyebut) seperti luas kantor, jumlah karyawan, dan sebagainya.
	E5 - Energi Mix (*EnergyMix*)	Biaya, sumber, ketersediaan, dan ketahanan dari energi berdampak langsung pada kemampuan perusahaan seperti penghematan energi.
	E6 – Konsumsi Air (*Water Usage*)	Penggunaan air perusahaan dan sumber air seperti air tanah, sungai, atau PDAM. Bagaimana kebijakan penggunaan air berlaku dalam perusahaan dan sebagainya.
	E7 - Peraturan, Prosedur dan Proses (PPP) mengenai Lingkungan (*Environmental Operations*)	Standar yang muncul mengenai tanggung jawab *Environmental* menuntut kebijakan dan pelaksanaan secara formal. Perusahaan yang membuat, menerbitkan, dan secara berkala memperbarui dokumen kebijakan terkait *Environmental*.
	E8 - Pengawasan Dewan Direksi Lingkungan (*Climate Oversight / Board*)	Pengawasan dari Dewan Direksi: misalnya perusahaan memiliki agenda rapat terkait risiko perubahan iklim dalam rapat dewan (sebagai bagian dari agenda resmi) atau memiliki dewan komite yang didedikasikan untuk isu-isu perubahan iklim dapat menjawab faktor ini.
	E9 - Pengawasan Manajemen Senior Lingkungan (*Climate Oversight / Management*)	Pengawasan manajemen: misalnya perusahaan memiliki agenda rapat terkait risiko perubahan iklim dalam rapat manajemen senior (sebagai bagian dari agenda resmi) atau memiliki komite manajemen yang didedikasikan untuk isu-isu yang berkaitan dengan iklim dapat memberikan jawaban untuk faktor ini.
	E10 - Pengelolaan dan Analisa Investasi kepada Iklim dan Lingkungan (*Climate Risk Mitigation*)	Menunjukkan pemahaman tentang bagaimana risiko fisik, risiko transisi, dan peluang perubahan iklim berdampak pada bisnis dari waktu ke waktu. Contoh adanya manajemen risiko perubahan iklim dalam salah satu risiko perusahaan.
	E11 – Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) di Perhutanan (*Forestry* CSR)	Sebagai tolak ukur kontribusi perusahaan secara langsung terhadap penjagaan dan perawatan hutan Meningkatkan kesadaran manajemen bahwa sektor perhutanan merupakan sektor penting dalam mengalokasikan dana CSR perusahaan.
Sosial	S1 – Perbandingan Gaji CEO (CEO *Pay Ratio*)	Menunjukkan valuasi dan implikasi biaya perusahaan untuk peran Kepala Eksekutif dibandingkan karyawan lain. Beberapa pemangku kepentingan (terutama investor) menyatakan bahwa metrik ini memungkinkan mereka untuk mengevaluasi dampak potensial kompensasi eksekutif; kesenjangan yang signifikan dalam pembayaran antara CEO dan karyawan perusahaan lainnya.
	S2 – Perbandingan Gaji Antar Gender (*Gender Pay Ratio*)	Guna menentukan ruang lingkup remunerasi dan dampak dari "kesenjangan *gender*" dalam perusahaan Banyak negara telah memperkenalkan undang-undang untuk menegakkan prinsip upah yang setara untuk pekerjaan yang bernilai sama. Isu ini didukung oleh Konvensi ILO. Kesetaraan remunerasi adalah faktor dalam mempertahankan kualifikasi karyawan di tempat kerja. Jika ada ketidakseimbangan, organisasi berisiko terhadap reputasi dan diskriminasi.

Komponen LST	Faktor LST	Penjelasan
	S3 - Persentase Pergantian Karyawan (*Employee Turnover*)	Persentase relatif karyawan yang berhenti dari perusahaan dapat secara langsung memengaruhi alokasi sumber daya, anggaran, perencanaan, dan produktivitas tingkat pergantian karyawan yang tinggi dapat menunjukkan tingkat ketidakpastian dan ketidakpuasan di antara karyawan, menandakan perubahan mendasar dalam struktur operasi inti organisasi.
	S4 - Persentase Keragaman *Gender* (*Gender Diversity*)	Meningkatkan keragaman pemikiran atau ide (sebagaimana diwujudkan dalam pria dan wanita) dapat mengarah pada peningkatan kreativitas, peningkatan produktivitas tim, dan pengurangan ketidakadilan sistemik. Informasi ini dapat menandakan upaya organisasi untuk menerapkan praktik perekrutan inklusif dan penggunaan optimal tenaga kerja serta bakat yang tersedia. Pola promosi dan senioritas yang tidak merata berdasarkan gender dapat menunjukkan risiko yang terkait dengan ketidakadilan di tempat kerja. Beberapa investor secara khusus menargetkan perusahaan yang lebih beragam (atau berbasis *gender*).
	S5 - Persentase Pekerja Sementara (*Temporary Worker Ratio*)	Rasio ini memberikan informasi tentang strategi dan manajemen sumber daya manusia Pengelompokkan tenaga kerja berdasarkan jenis pekerjaan menunjukkan bagaimana organisasi mengatur sumber daya manusia untuk mengimplementasikan strategi keseluruhannya.
	S6 - PPP Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)	Apakah terdapat tindakan diskriminasi dalam perusahaan, seperti dari sisi gaji, perekrutan, dan yang lainnya. Rasio ini memberikan wawasan yang berharga tentang strategi dan manajemen sumber daya manusia terkait perlindungan tertentu. Stakeholder menggunakan metrik ini untuk mengevaluasi kemanjuran dan ruang lingkup manajemen risiko perusahaan (ERM).
	S7 – Angka Cedera/ Kecelakaan (*Injury Rate*)	Tingkat cedera dan absensi yang rendah umumnya terkait dengan tren positif dalam moral dan produktivitas tenaga kerja. Yang diungkapkan terkait jumlah total cedera dan kematian, terhadap total tenaga kerja.
	S8 - Tingkat Kesehatan dan Keselamatan dalam Lapangan Pekerjaan (*Global Health and Safety*)	Indikator ini mengungkapkan sejauh mana tenaga kerja secara sadar mengetahui kebijakan yang menentukan prinsip-prinsip manajemen kesehatan dan keselamatan.
	S9 - Pekerja Anak / Pekerja Paksa (*Child and Forced Labor*)	Pekerja anak dan tenaga kerja paksa: kondisi kerja yang bertentangan dengan hukum yang berlaku membuat perusahaan menghadapi risiko yang signifikan.
	S10 - PPP Hak Asasi Manusia (*Human Rights*)	Kepatuhan terhadap kebijakan hak asasi manusia yang kuat sering mengarah pada peningkatan produktivitas, modal manusia yang lebih baik, dinamika, dan risiko yang lebih rendah.
	S11 – CSR di Komunikasi Masyarakat (*Social* CSR)	Sebagai tolak ukur kontribusi perusahaan secara langsung terhadap Social eksternal perusahaan Meningkatkan kesadaran manajemen bahwa sektor Social eksternal merupakan sektor penting dalam mengalokasikan dana CSR perusahaan.

Komponen LST	Faktor LST	Penjelasan
Tata Kelola	G1 - Keberagaman Anggota Dewan (*Board Diversity*)	Penelitian cenderung menunjukkan peningkatan jumlah wanita dalam anggota dewan memiliki hasil bisnis yang lebih baik, termasuk: kinerja keuangan yang kuat, kemampuan untuk menarik dan mempertahankan talenta top, inovasi yang tinggi, wawasan klien yang meningkat, kinerja yang kuat pada indikator non-keuangan, dan peningkatan efektivitas dewan.
	G2 - Kemandirian Dewan dari Kendali Pihak Lain (*Board Independence*)	Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitenya berdasarkan: i. eksekutif atau bukan eksekutif; ii. mandiri; iii. masa jabatan badan tata kelola; iv. jumlah posisi dan komitmen signifikan lainnya dari setiap individu, serta sifat dari komitmen; v. jenis kelamin; dan sebagainya.
	G3 – Dorongan Moneter yang Terkait dengan *Sustainability* (*Incentivized pay*)	Kebijakan remunerasi untuk badan tata kelola tertinggi dan eksekutif dan senior untuk jenis- jenis remunerasi berikut: pesangon, bonus mendaftar/perekrutan, tunjangan pensiun.
	G4 - Protokol dan Perjanjian Perundingan Bersama (*Collective Bargaining*)	Persentase total karyawan yang dicakup oleh perjanjian perundingan kolektif.
	G5 – Kode Etik Pihak Ketiga (*Supplier Code of Conduct*)	Kebijakan perusahaan terkait pihak ketiga seperti supplier, vendor dan yang lainnya terkait isu *Social, Environmental,* dan *Governance*.
	G6 - Etika dan Kepatuhan Hukum Antikorupsi (*Ethics & Anti-Corruption Compliance*)	Kasus dan kebijakan terkait korupsi atau *fraud* perusahaan.
	G7 - Privasi dan Perlindungan Data Pribadi (*Data Privacy*)	Kasus kebocoran data dan bagaimana perlindungan data konsumen dilakukan oleh perusahaan.
	G8 – *Sustainability Reports* (LST *Reporting*)	Menunjukkan ada atau tidak adanya komunikasi publik mengenai kinerja LST perusahaan, misalnya melalui penyusunan SR, LST *Impact Assessment,* dan yang lainnya.
	G9 - Mekanisme *Disclosure* (*Disclosure Practices*)	Mekanisme pengungkapan informasi sesuai GRI, misalnya topik utama dan materialitas harus ditulis dengan melalui keterlibatan pemangku kepentingan.
	G10 - Jaminan Independen/ *Independent (External) Assurance*	Ini menunjukkan validasi dari data keberlanjutan yang diterbitkan oleh perusahaan melalui berbagai saluran pelaporan.
	G11 - Transparansi Pajak (*Tax Transparency*)	Menunjukkan transparansi perusahaan terkait pendekatan dan tata kelola pajak.





TUJUAN

Aspek-aspek terkait LST telah menjadi elemen yang sangat penting dalam dunia bisnis saat ini. Kesadaran global terhadap isu keberlanjutan mendorong perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh operasional perusahaan. Di berbagai belahan dunia, perusahaan mulai diwajibkan untuk mengintegrasikan aspek LST dalam praktik bisnis mereka melalui regulasi ketat dan standar internasional.

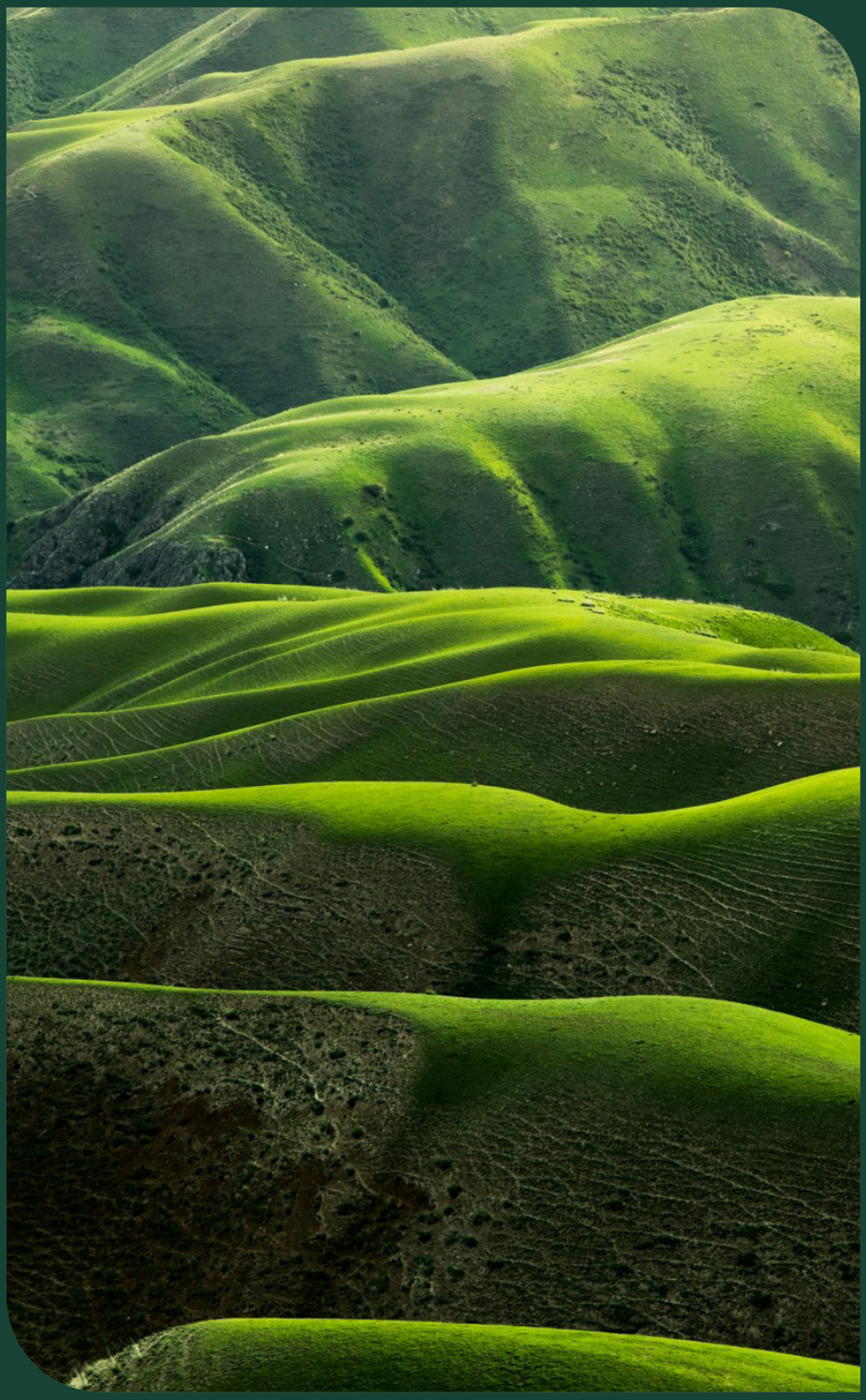
Pengungkapan LST kini menjadi salah satu tolok ukur kepercayaan investor, pemangku kepentingan, serta daya saing perusahaan di pasar global. Investor semakin selektif dalam memilih perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan tata kelola yang baik. Pengungkapan yang transparan terkait kinerja LST tidak hanya menjadi tuntutan regulasi, tetapi juga membangun reputasi perusahaan, menarik investor yang sadar keberlanjutan, dan menciptakan nilai jangka panjang. Integrasi LST dalam strategi bisnis merupakan langkah penting bagi perusahaan untuk tetap relevan, kompetitif, dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan global.

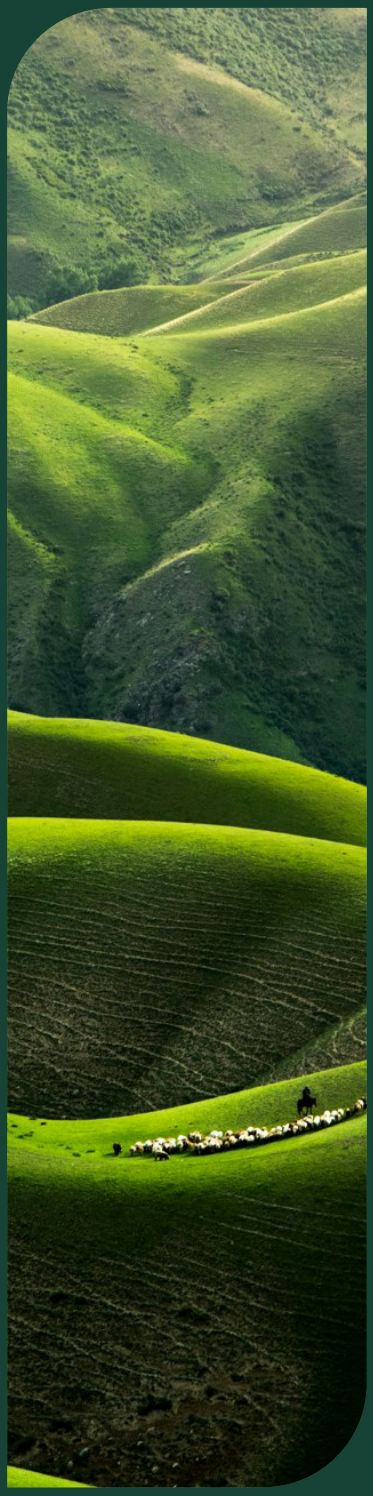
Analisa pengungkapan LST dari perusahaan nasional diharapkan dapat digunakan sebagai sumber data bagi para pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, regulator, dan masyarakat umum. Data yang disajikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, baik itu keputusan investasi, keputusan bisnis, maupun sebagai media pengawasan terhadap kinerja keberlanjutan perusahaan. Melalui pengungkapan yang transparan dan akurat, para pemangku kepentingan dapat menilai sejauh mana perusahaan berkomitmen terhadap keberlanjutan dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Secara internal, laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap perusahaan agar kualitas laporan keberlanjutan mereka kedepannya menjadi lebih baik. BGK Foundation berkomitmen untuk melakukan peninjauan secara berkala atas laporan keberlanjutan yang disusun perusahaan, guna memastikan bahwa pengungkapan yang dilakukan tetap relevan, terukur, dan sesuai dengan perkembangan tren keberlanjutan yang ada. Dengan adanya peninjauan dan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan perusahaan dapat lebih efektif dalam memenuhi standar keberlanjutan yang diharapkan oleh semua pihak terkait.

Dengan demikian, tujuan utama keterbukaan LST adalah untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada para pemangku kepentingan, membantu Indonesia mempercepat pencapaian target *net zero emission*, dan meningkatkan daya saing perusahaan, khususnya perusahaan emiten di Indonesia. Keterbukaan LST juga memungkinkan para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi, mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan, dan membangun kepercayaan antara perusahaan dan pemangku kepentingan.







METODOLOGI



Penilaian laporan keberlanjutan ini melibatkan 148 perusahaan dengan periode akhir tahun finansial pada 31 Desember 2024.

Proses seleksi dilakukan berdasarkan ketersediaan laporan keberlanjutan yang diterbitkan di *website official* masing-masing perusahaan. Hal ini memastikan bahwa hanya perusahaan yang secara aktif melaporkan praktik keberlanjutan mereka. Selain itu, laporan keberlanjutan yang mengacu pada *Standar Global Reporting Initiative* (GRI) yang akan dipertimbangkan dalam penilaian, sementara laporan yang tidak menggunakan standar tersebut dikecualikan dari penilaian untuk menjaga konsistensi dan kualitas analisis.

Adapun distribusi perusahaan yang dipilih dan dilakukan penilaian mencakup berbagai sektor industri, dengan rincian sebagai berikut:

Sektor	Jumlah Perusahaan	Persentase
Keuangan	29	20%
Energi	23	16%
Barang Konsumen Primer	22	15%
Infrastruktur	20	14%
Barang Baku	19	13%
Properti & Real Estate	7	5%
Perindustrian	6	4%
Kesehatan	5	3%
Lainnya	17	11%
Total Persentase		**100%**
Perusahaan Emiten		**125**
Perusahaan Non Emiten		**23**
Total Perusahaan		**148**

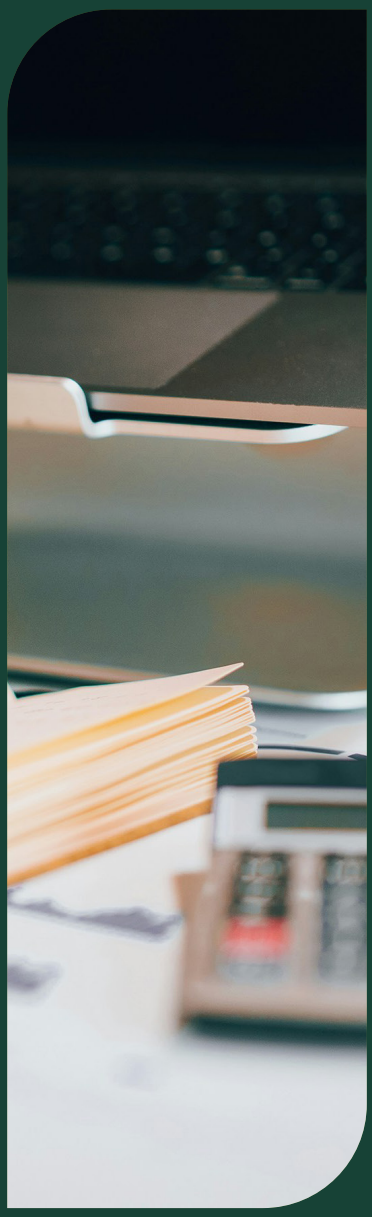
Selanjutnya, penilaian pengungkapan laporan keberlanjutan setiap perusahaan berfokus pada faktor-faktor berikut:

- Apakah penyusunan laporan keberlanjutan menggunakan *Standar Global Reporting Initiative* (GRI);
- Kapan laporan keberlanjutan diterbitkan;
- Apakah laporan keberlanjutan telah melalui proses *assurance* oleh pihak ketiga independen (AA1000 atau ISAE3000);
- Pengungkapan dari perusahaan berdasarkan penilaian 33 faktor LST;
- Bagaimana perusahaan mempersiapkan laporan keberlanjutan dan seberapa detail informasi yang diungkapkan dalam laporan, serta kesesuaian dengan *Standar Global Reporting Initiative* (GRI).

Dalam menilai kelima poin di atas, BGK Foundation menggunakan metode penilaian kuantitatif untuk memastikan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap pengungkapan LST. Suatu pengungkapan dianggap memenuhi kriteria jika perusahaan telah memberikan informasi yang jelas mengenai kepatuhan terhadap setiap faktor LST. Namun, pengungkapan dianggap belum terpenuhi apabila perusahaan tidak memberikan informasi atau alasan atas kurangnya informasi terkait suatu faktor LST. Laporan keberlanjutan yang telah melalui proses *assurance* oleh pihak ketiga independen (AA1000 atau ISAE3000) juga akan mendapatkan nilai lebih tinggi dibandingkan dengan laporan yang tidak di *assurance*.





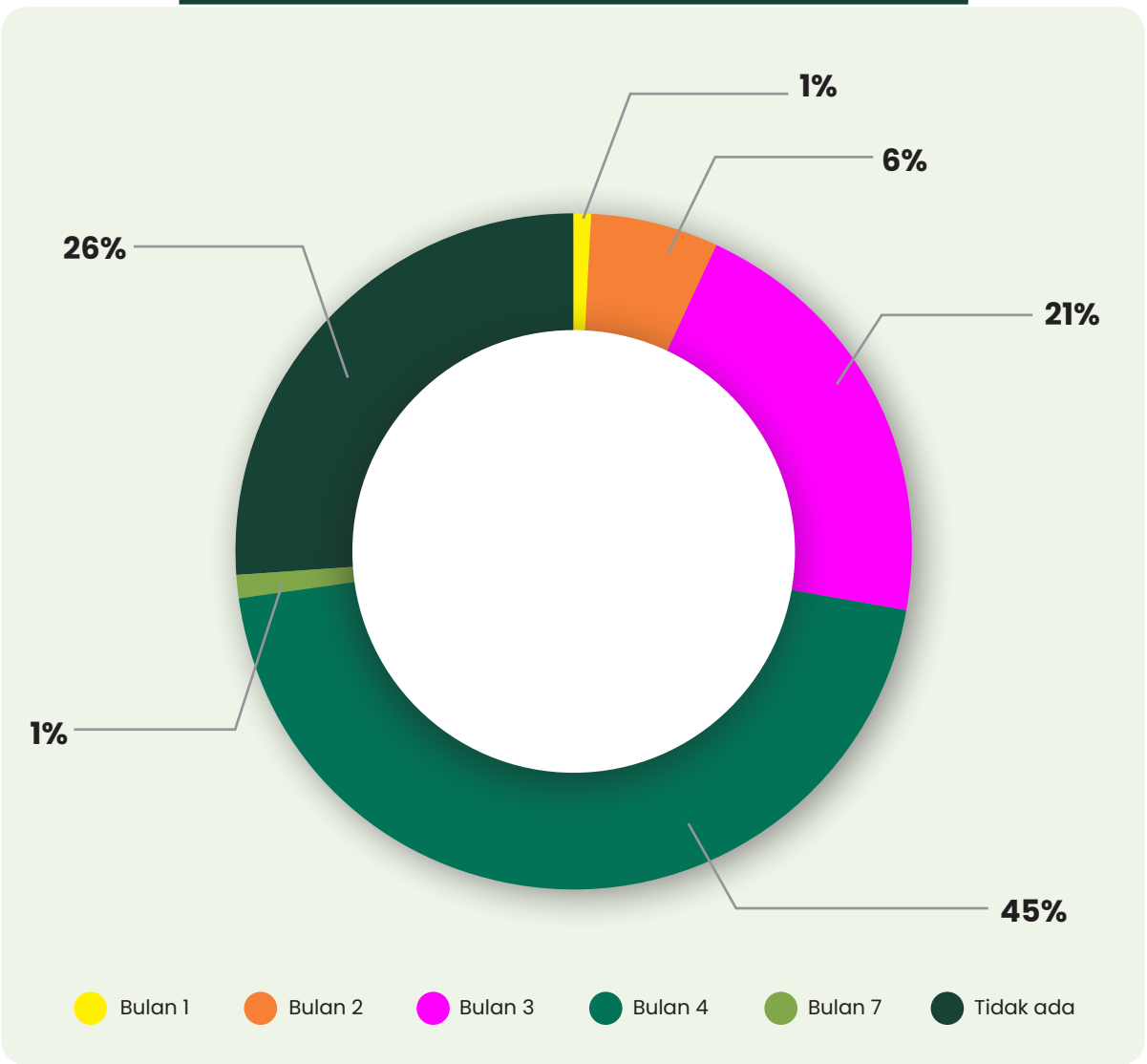


TINGKAT KETEPATAN WAKTU PELAPORAN LAPORAN KEBERLANJUTAN DARI PERIODE TAHUN FISKAL

Berdasarkan data 148 perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan, masih terdapat perusahaan yang tidak menyertakan informasi waktu laporan diterbitkan. Dari perusahaan yang mencantumkan informasi tersebut, sebanyak 76% menerbitkan laporan keberlanjutannya antara bulan pertama hingga kedelapan setelah tahun tutup buku fiskal.

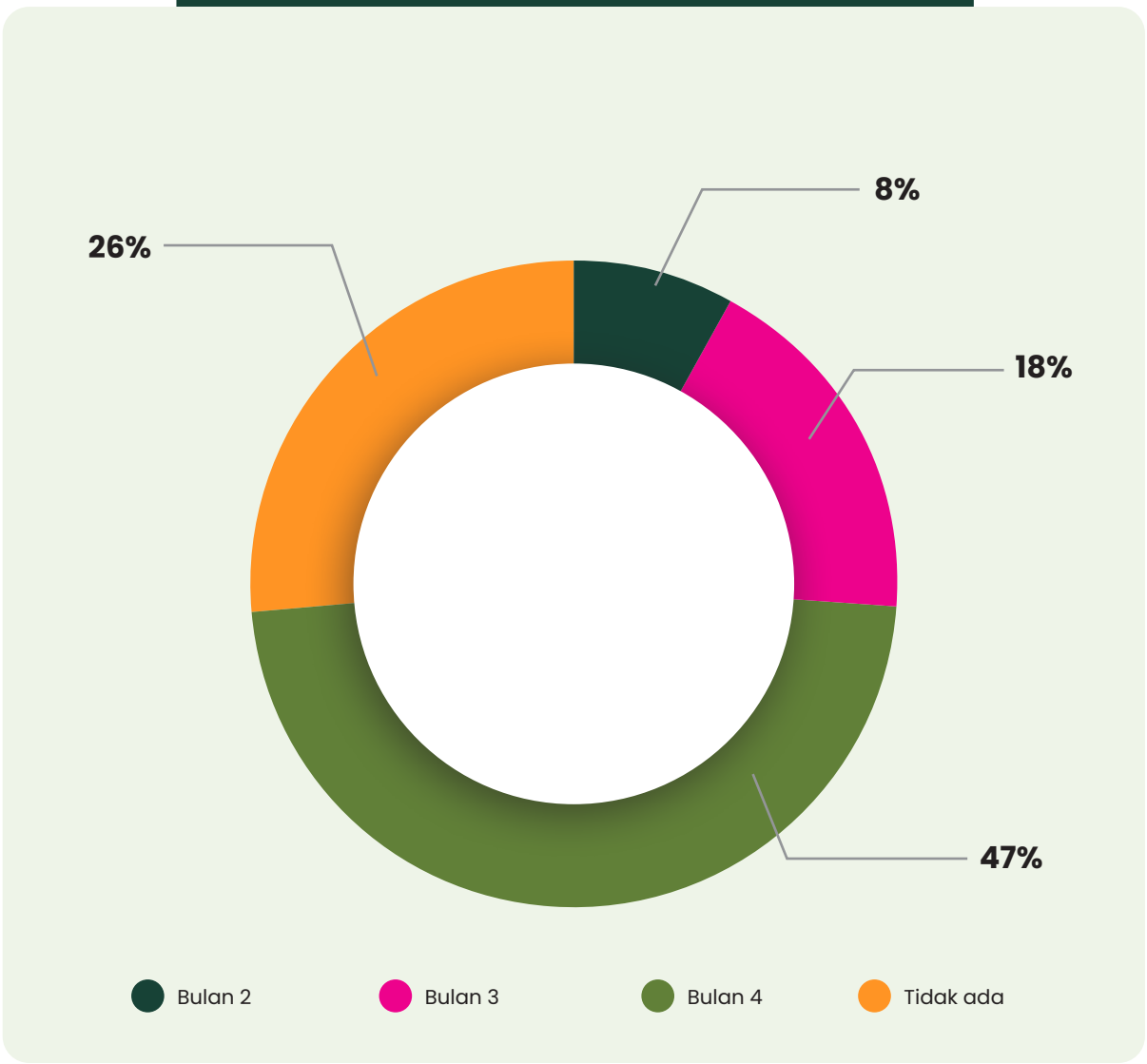
Analisis lebih rinci mengenai ketepatan waktu pelaporan dapat dilihat melalui grafik yang menyajikan distribusi penerbitan laporan keberlanjutan berdasarkan waktu penerbitan relatif terhadap tahun fiskal berakhir.

Grafik 1. Ketepatan Waktu Pelaporan 125 Perusahaan Emiten



Berdasarkan grafik 1, dapat dilihat bahwa sebanyak 2% perusahaan menerbitkan laporan keberlanjutannya pada bulan pertama. Diikuti dengan 6% menerbitkan laporan pada bulan kedua dan 21% pada bulan ketiga. Selanjutnya, sebanyak 45% perusahaan menerbitkan laporan keberlanjutan pada bulan keempat, dan 1% pada bulan ketujuh dari tahun fiskal berakhir. Sedangkan sisanya, yaitu sebanyak 26% perusahaan tidak menyertakan informasi terkait waktu penerbitan laporan keberlanjutan mereka.

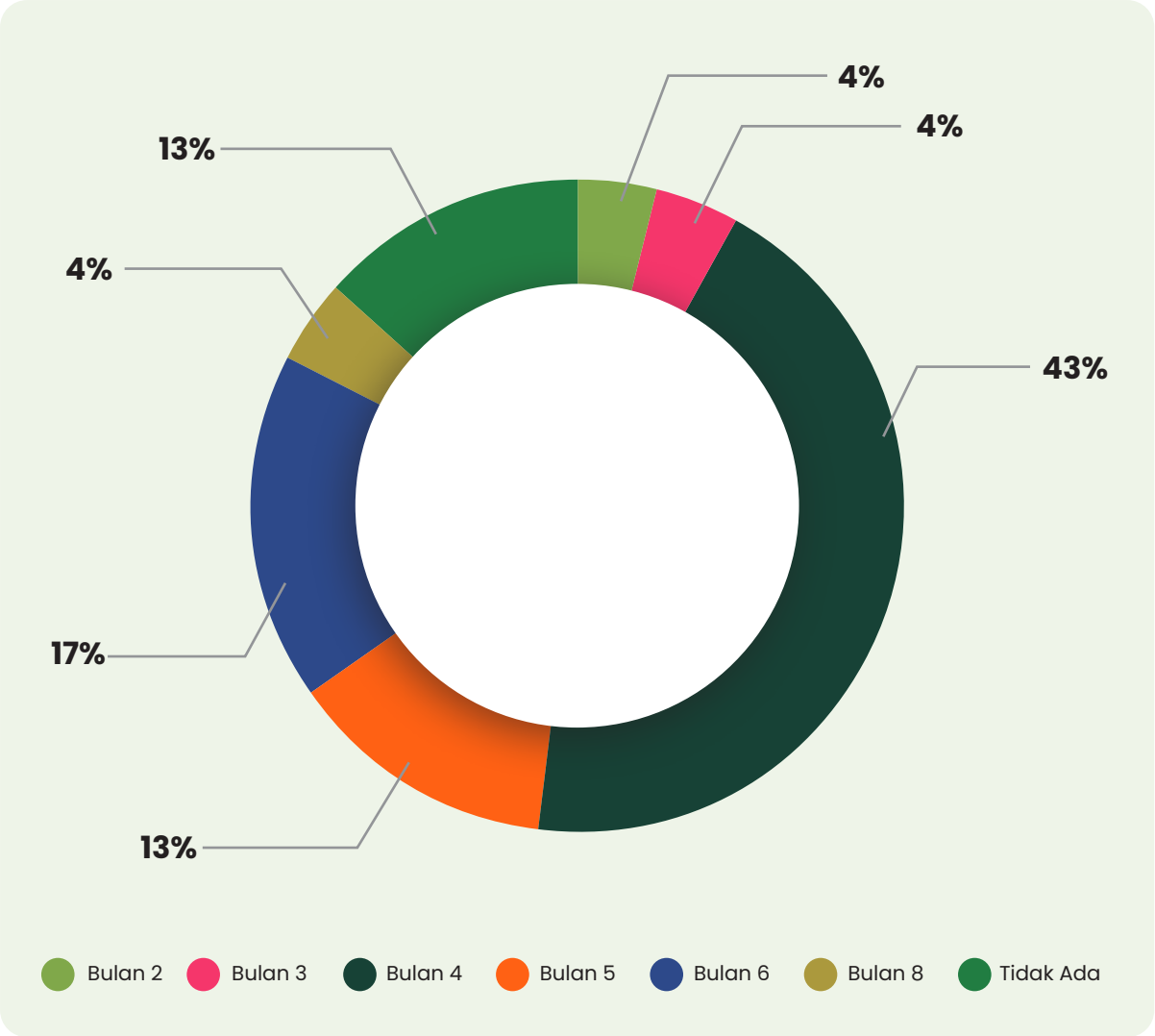
Grafik 2. Ketepatan Waktu Pelaporan 38 Perusahaan Emiten LQ45



Berdasarkan grafik 2, dapat dilihat bahwa sebanyak 8% perusahaan emiten LQ45 menerbitkan laporan keberlanjutannya pada bulan kedua. Selanjutnya, sebanyak 18% perusahaan menerbitkan laporan keberlanjutan pada bulan ketiga, dan 47% pada bulan keempat dari tahun fiskal berakhir. Sedangkan sisanya, yaitu sebanyak 26% perusahaan tidak menyertakan informasi terkait waktu penerbitan laporan keberlanjutan mereka.

Secara keseluruhan, sebanyak 74% perusahaan emiten LQ45 telah menerbitkan laporan keberlanjutannya sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh regulator nasional. Di mana batas akhir pengumpulan laporan keberlanjutan tahun 2024 ditetapkan paling lambat pada April 2025 atau bulan keempat. Adapun tingkat tertinggi pelaporan dari perusahaan emiten LQ45 terjadi pada bulan keempat yang sebesar 47%.

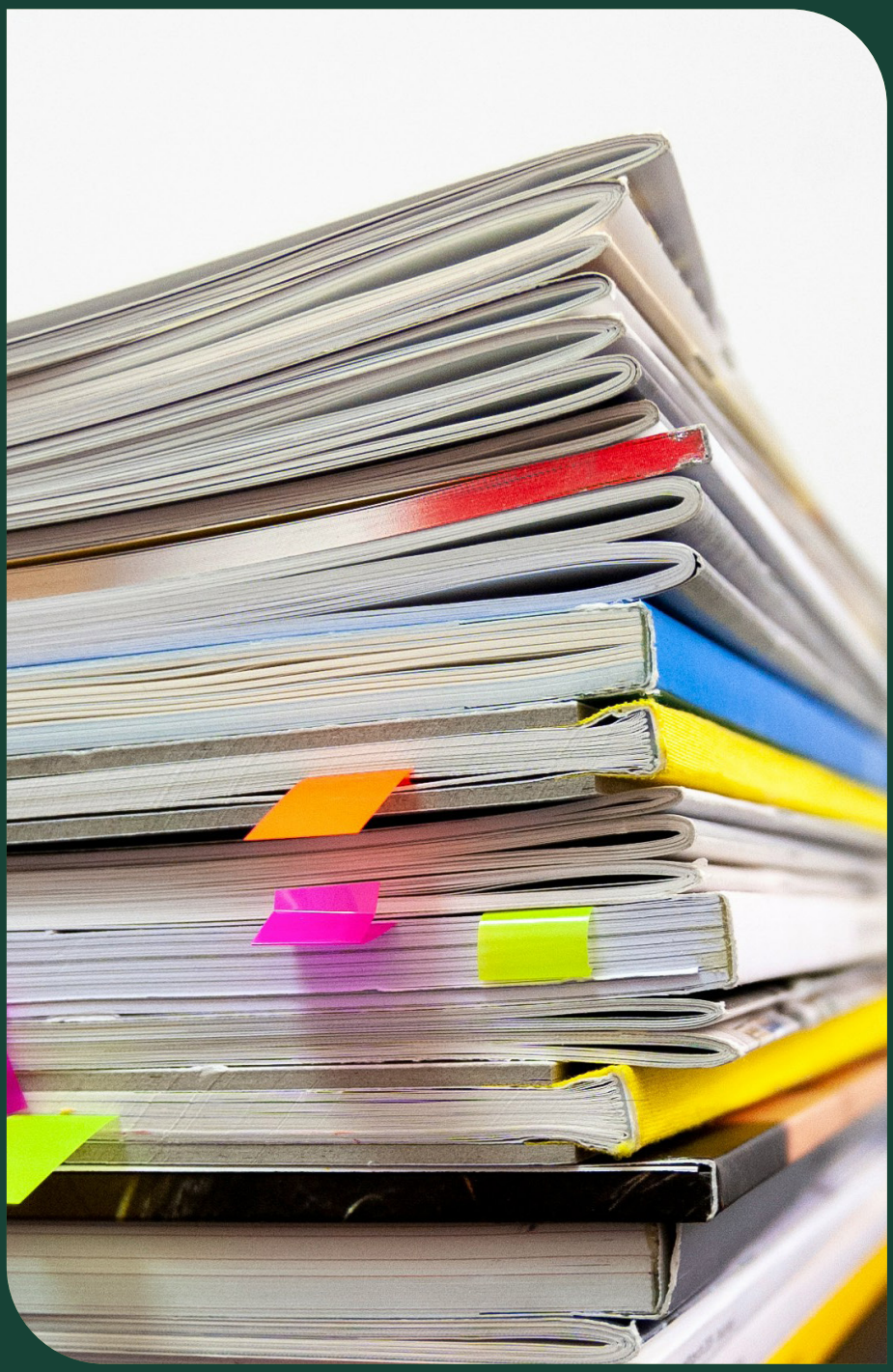
Grafik 3. Ketepatan Waktu Pelaporan 23 Perusahaan Non-Emiten



Selanjutnya, grafik 3 memperlihatkan perusahaan-perusahaan non-emiten memiliki hasil yang lebih bervariasi, dengan waktu penerbitan laporan mulai dari bulan kedua hingga kedelapan. Hasil ini menunjukkan bahwa waktu penerbitan laporan perusahaan non-emiten yang belum memiliki kewajiban menyusun laporan keberlanjutan, sehingga pelaporan masih menyesuaikan dengan kebutuhan rencana kerja masing-masing.

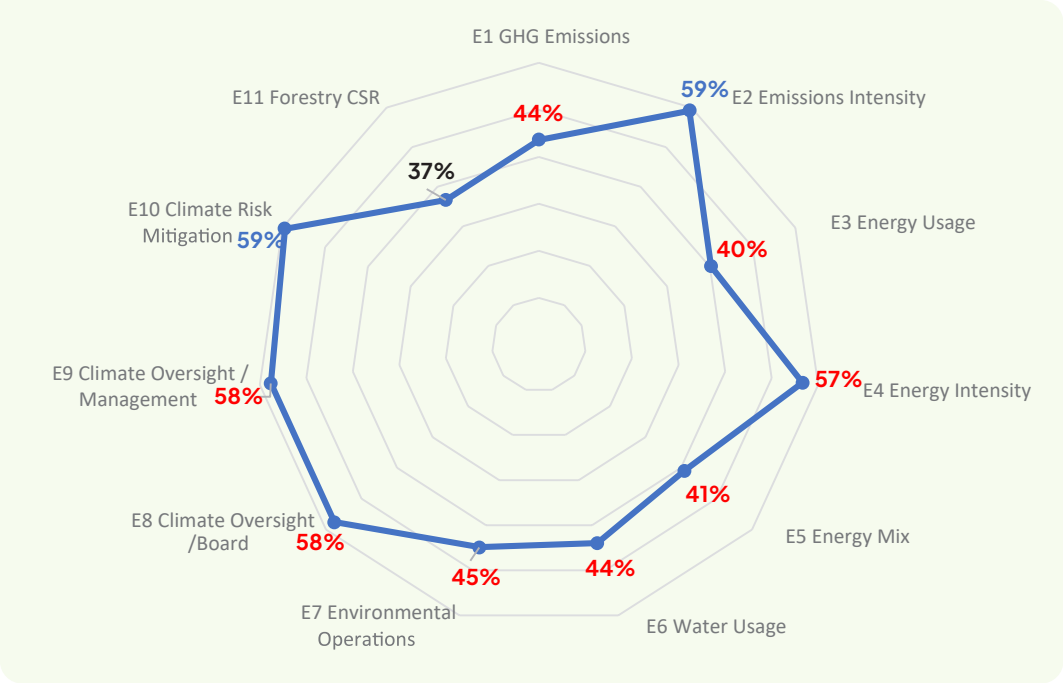
Dari ketiga grafik di atas, menunjukkan bahwa masih terdapat 24% perusahaan emiten dan non-emiten yang tidak mencantumkan waktu penerbitan laporan keberlanjutan mereka. Hal ini berdasarkan penelusuran kami dari masing-masing laporan keberlanjutan dengan tidak ditemukannya tanggal atau bulan pengesahan dalam laporan keberlanjutan tersebut.

Ketepatan waktu penerbitan laporan keberlanjutan menjadi sangat penting karena secara langsung menunjukkan sejauh mana isu keberlanjutan (LST) diprioritaskan oleh perusahaan. Semakin cepat laporan keberlanjutan diterbitkan, maka semakin cepat pula keputusan bisnis yang berlandaskan keberlanjutan dapat diambil. Selain itu, pengawasan dan evaluasi dari para pemangku kepentingan juga dapat dilakukan lebih cepat, memungkinkan adanya umpan balik yang lebih efisien dan peningkatan yang berkelanjutan dalam kinerja perusahaan terkait LST.



HASIL DAN ANALISA PENGUNGKAPAN 33 FAKTOR LST EMITEN

Pengungkapan Lingkungan 125 Perusahaan Emiten



Nilai rata-rata pengungkapan topik lingkungan dari 125 perusahaan emiten adalah sebesar 49%, dengan pengungkapan tertinggi dan terendah sebagai berikut:

Emissions Intensity (E2)
59%

Nilai Pengungkapan Tertinggi:

Tingkat efisiensi perusahaan dalam menghasilkan nilai ekonomi dibandingkan dengan jumlah emisi yang dihasilkan. Semakin rendah intensitas emisi, semakin efisien perusahaan dalam menggunakan sumber daya dan semakin kecil emisi yang dihasilkan untuk setiap unit nilai ekonomi.

Climate Risk Mitigation (E10)
59%

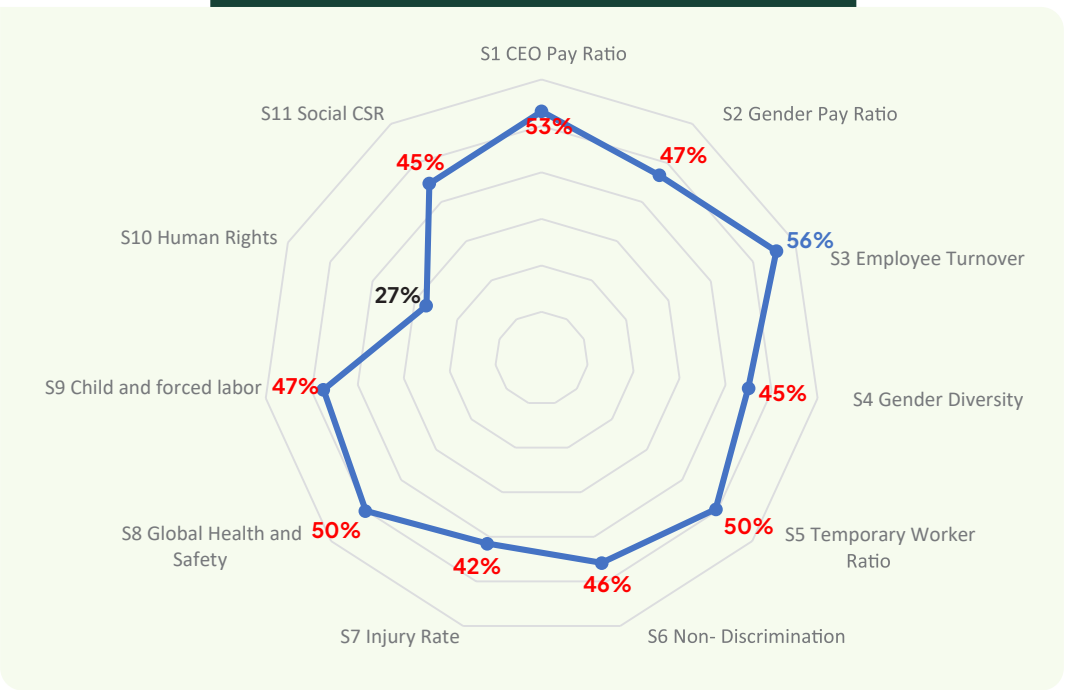
Menunjukkan pemahaman tentang bagaimana risiko fisik, risiko transisi, dan peluang perubahan iklim berdampak pada bisnis dari waktu ke waktu. Contoh adanya manajemen risiko perubahan iklim dalam salah satu risiko perusahaan.

Forestry CSR (E11)
37%

Nilai Pengungkapan Terendah:

Sebagai tolak ukur kontribusi perusahaan secara langsung terhadap penjagaan dan perawatan hutan. Mencerminkan komitmen perusahaan dalam melestarikan lingkungan serta meningkatkan kesadaran manajemen bahwa sektor perhutanan merupakan sektor penting dalam mengalokasikan dana CSR perusahaan.

Pengungkapan Sosial 125 Perusahaan Emiten



Nilai rata-rata pengungkapan topik sosial dari 125 perusahaan emiten adalah sebesar 46%, dengan pengungkapan tertinggi dan terendah sebagai berikut:

Employee Turnover (S3)
56%

Nilai Pengungkapan Tertinggi:

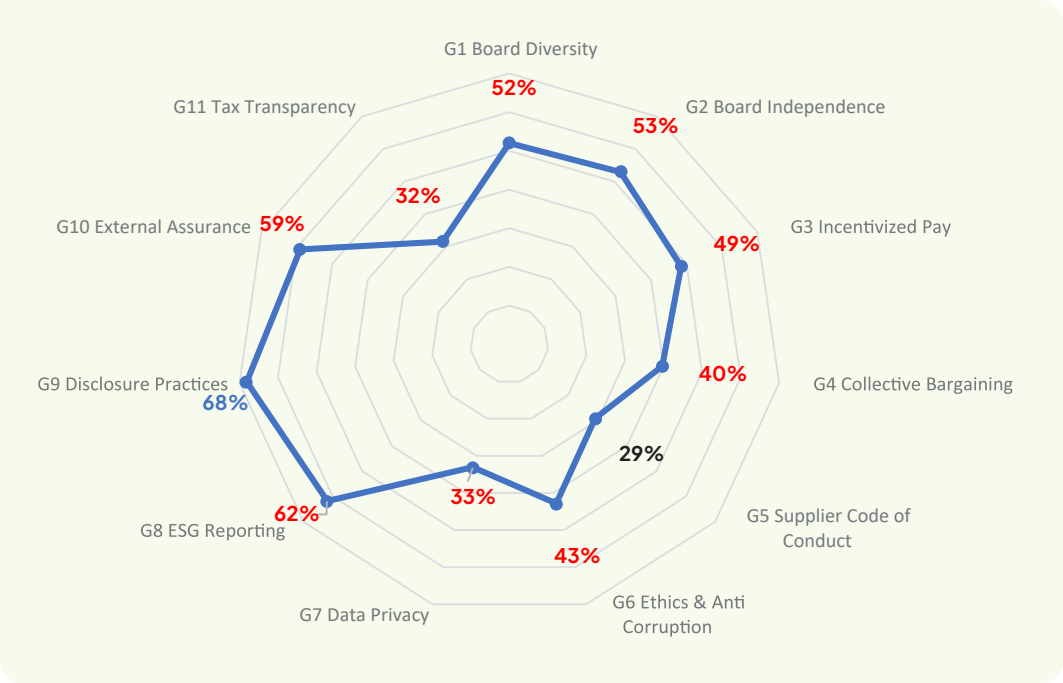
Persentase relatif karyawan yang berhenti atau meninggalkan perusahaan dapat secara langsung memengaruhi alokasi sumber daya, anggaran, perencanaan, dan produktivitas. Tingkat pergantian karyawan yang tinggi dapat menunjukkan tingkat ketidakpastian dan ketidakpuasan di antara karyawan, menandakan perubahan mendasar dalam struktur operasi inti organisasi.

Human Rights (S10)
27%

Nilai Pengungkapan Terendah:

Kepatuhan terhadap kebijakan hak asasi manusia yang kuat sering kali mengarah pada peningkatan produktivitas, pengembangan modal manusia yang lebih baik, dinamika tempat kerja yang lebih positif, dan risiko operasional yang lebih rendah. Dengan memastikan hak asasi manusia dihormati dan dilindungi dalam lingkungan kerja, perusahaan dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi karyawan untuk berkontribusi secara maksimal.

Pengungkapan Tata Kelola 125 Perusahaan Emiten



Nilai rata-rata pengungkapan topik tata kelola dari 125 perusahaan emiten adalah sebesar 47%, dengan pengungkapan tertinggi dan terendah sebagai berikut:

Disclosure Practices (G9)
68%

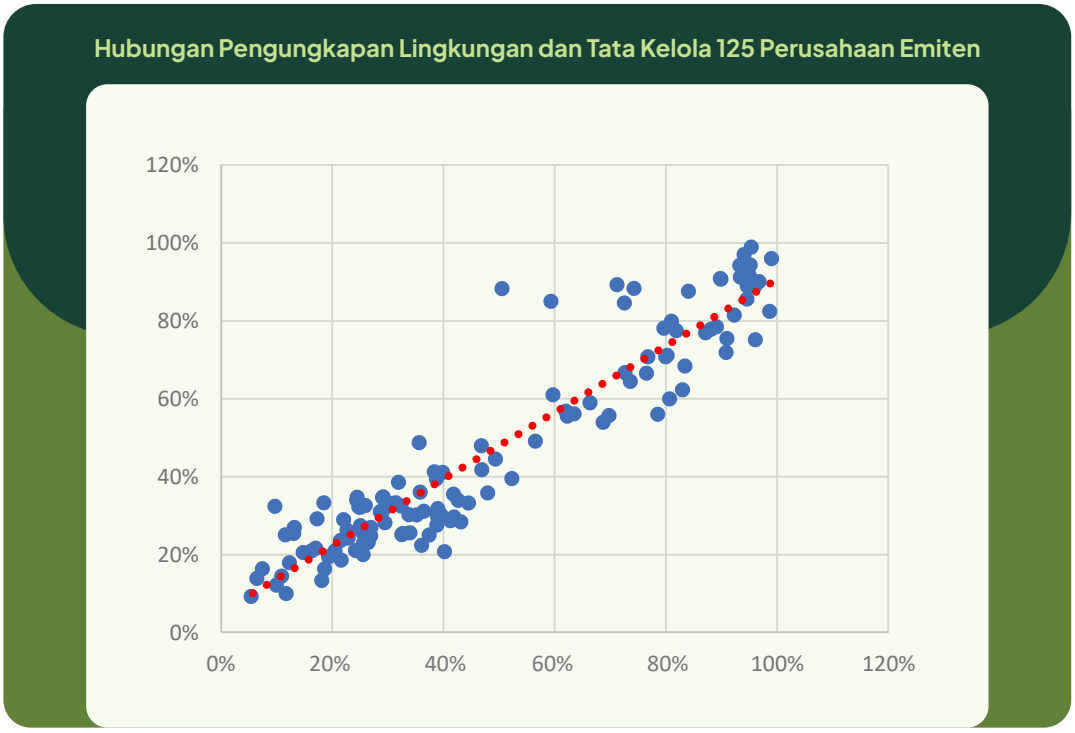
Nilai Pengungkapan Tertinggi:

Mekanisme pengungkapan informasi sesuai dengan standar *Global Reporting Initiative* (GRI), serta mematuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Salah satu aspek penting dalam proses ini adalah penulisan topik utama dan penentuan materialitas yang dilakukan harus melalui keterlibatan pemangku kepentingan.

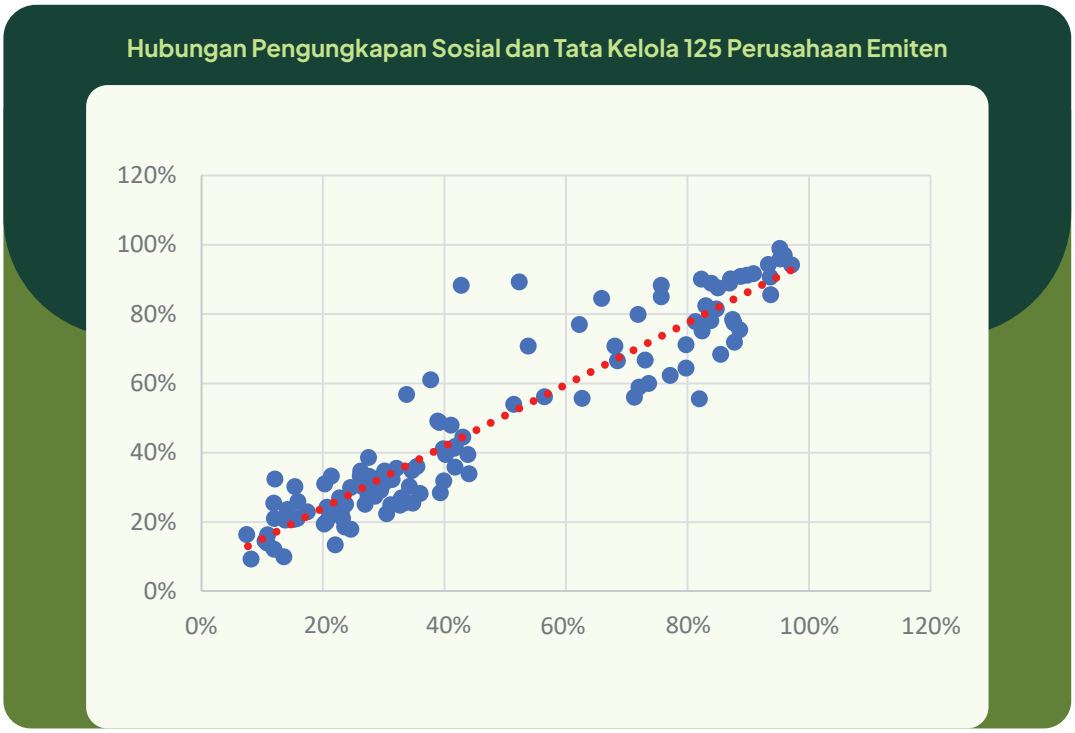
Supplier Code of Conduct (G5)
29%

Nilai Pengungkapan Terendah:

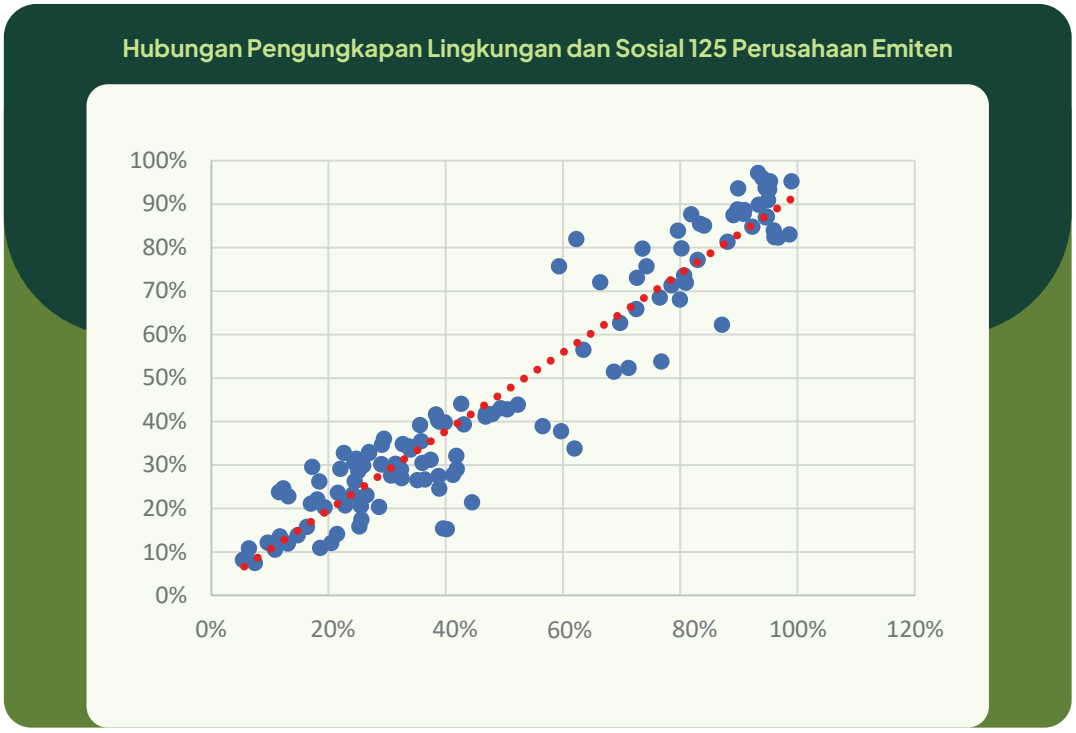
Kebijakan perusahaan terkait pihak ketiga seperti pemasok, vendor, dan mitra bisnis lainnya, merupakan bagian integral dalam memastikan bahwa seluruh rantai pasokan dan operasional bisnis telah mematuhi standar yang tinggi khususnya terkait isu sosial, lingkungan, dan tata kelola.



Berdasarkan *scatter plot* di atas, menunjukkan hubungan antara variabel *environment* dan *government* pada masing-masing emiten saham. Dari *trendline* ditunjukan hubungan positif antara kedua variabel, dimana semakin meningkatnya tingkat *environment*, juga diikuti dengan meningkatnya tingkat *government* nya. Kemudian apabila dilihat dari nilai koefisennya yakni 85,73% menunjukkan pengaruh variabel *environment* sebesar 85,73% terhadap variabel *government*.

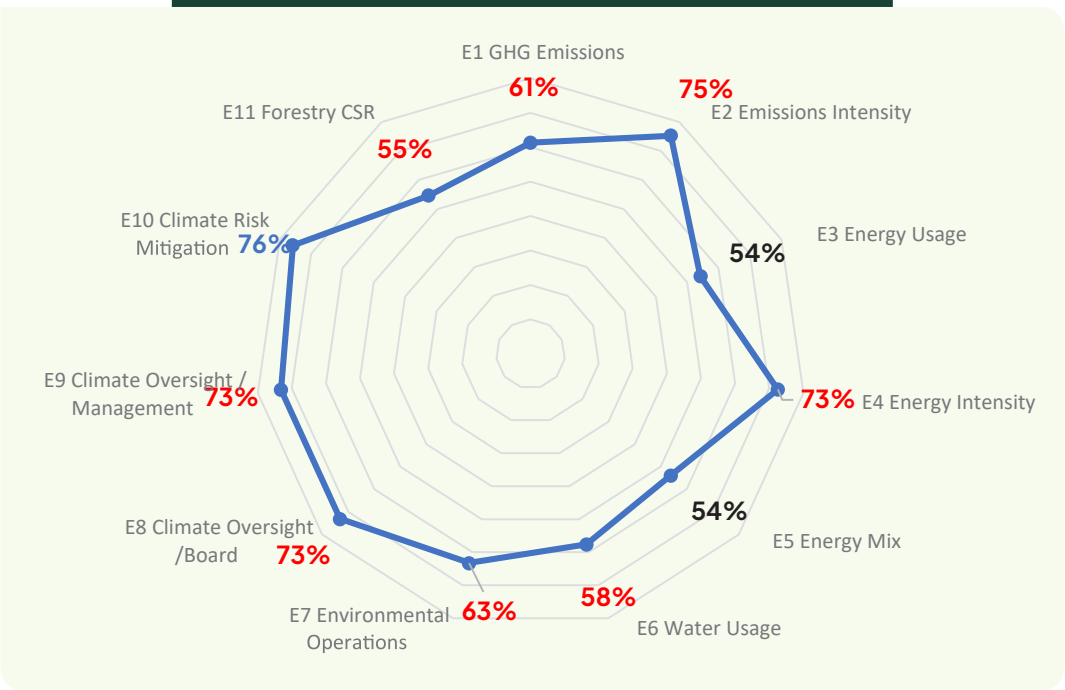


Berdasarkan *scatter plot* di atas, menunjukkan hubungan antara variabel *social* dan *government* pada masing-masing emiten saham. Dari *trendline* ditunjukan hubungan positif antara kedua variabel, dimana semakin meningkatnya tingkat *social*, juga diikuti dengan meningkatnya tingkat *government* nya. Kemudian apabila dilihat dari nilai koefisiennya yakni 89,43% menunjukkan pengaruh variabel *social* sebesar 89,43% terhadap variabel *government*.



Berdasarkan *scatter plot* di atas, menunjukkan hubungan antara variabel *environment* dan *social* pada masing-masing emiten saham. Dari *trendline* ditunjukan hubungan positif antara kedua variabel, dimana semakin meningkatnya tingkat *environment,* juga diikuti dengan meningkatnya tingkat *social* nya. Kemudian apabila dilihat dari nilai koefisennya yakni 90,78% menunjukkan pengaruh variabel *environment* sebesar 90,78% terhadap variabel *social*.

Pengungkapan Lingkungan 38 Perusahaan Emiten LQ45



Nilai rata-rata pengungkapan topik lingkungan dari 33 perusahaan emiten LQ45 adalah sebesar 65%, dengan pengungkapan tertinggi dan terendah sebagai berikut:

Climate Risk Mitigation (E10)
76%

Nilai Pengungkapan Tertinggi:

Menunjukkan pemahaman tentang bagaimana risiko fisik, risiko transisi, dan peluang perubahan iklim berdampak pada bisnis dari waktu ke waktu. Contoh adanya manajemen risiko perubahan iklim dalam salah satu risiko perusahaan.

Energy Usage (E3)
54%

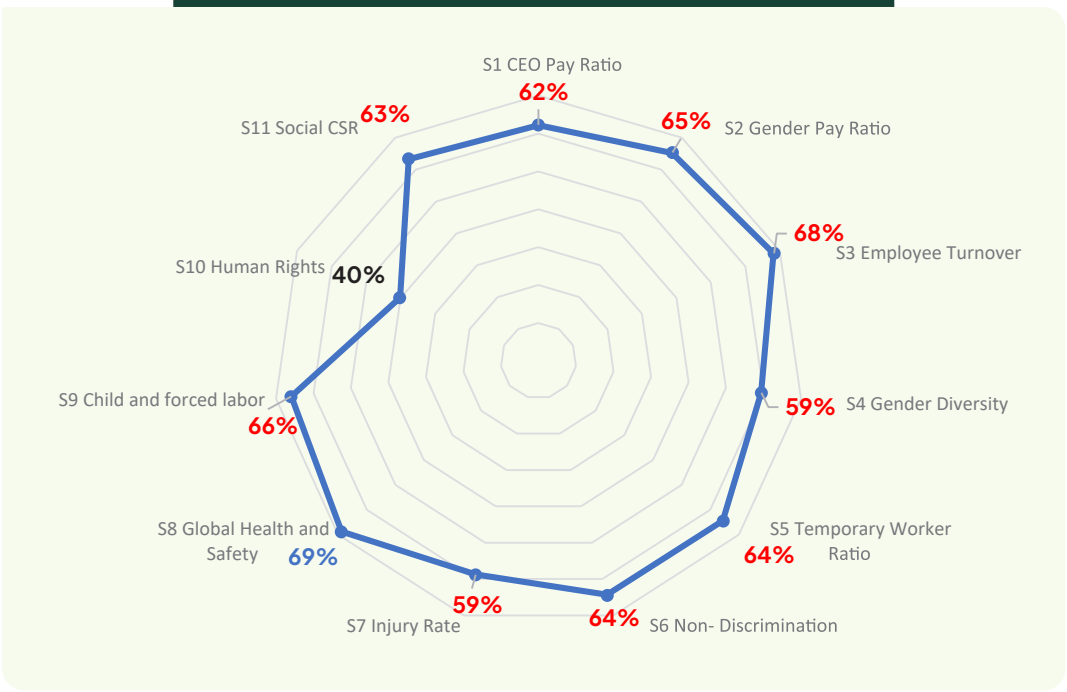
Nilai Pengungkapan Terendah:

Menunjukan tingkat penggunaan dan pelaporan energi perusahaan, seperti BBM, listrik, freon, dan sumber energi lainnya. Semakin baik pengelolaan dan efisiensi energinya, semakin baik kinerja perusahaan dalam aspek ini.

Energy Mix (E5)
54%

Upaya perusahaan mengelola berbagai sumber energi yang digunakan, seperti listrik, BBM, atau energi terbarukan, dengan mempertimbangkan biaya, ketersediaan, keandalan, dan upaya penghematan energi.

Pengungkapan Sosial 38 Perusahaan Emiten LQ45



Nilai rata-rata pengungkapan topik sosial dari 33 perusahaan emiten LQ45 adalah sebesar 62%, dengan pengungkapan tertinggi dan terendah sebagai berikut:

Global Health and Safety (S8)
69%

Nilai Pengungkapan Tertinggi:

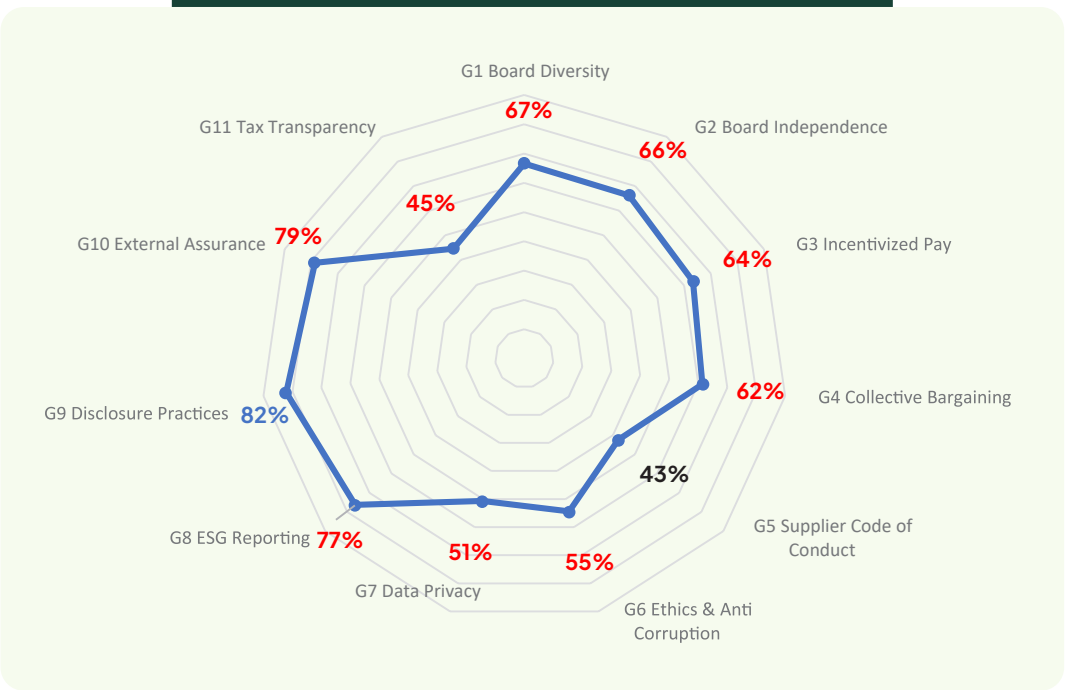
Indikator ini mengungkapkan seberapa baik perusahaan dalam memberikan pemahaman, kebijakan, dan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja kepada seluruh tenaga kerja, termasuk kesadaran terhadap risiko kerja, prosedur keselamatan, pencegahan kecelakaan, dan perlindungan kesehatan karyawan.

Human Rights (S10)
40%

Nilai Pengungkapan Terendah:

Kepatuhan terhadap kebijakan hak asasi manusia yang kuat sering kali mengarah pada peningkatan produktivitas, pengembangan modal manusia yang lebih baik, dinamika tempat kerja yang lebih positif, dan risiko operasional yang lebih rendah. Dengan memastikan hak asasi manusia dihormati dan dilindungi dalam lingkungan kerja, perusahaan dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi karyawan untuk berkontribusi secara maksimal.

Pengungkapan Tata Kelola 38 Perusahaan Emiten LQ45



Nilai rata-rata pengungkapan topik tata kelola dari 38 perusahaan emiten LQ45 adalah sebesar 63%, dengan pengungkapan tertinggi dan terendah sebagai berikut:

Disclosure Practices (G9)
82%

Nilai Pengungkapan Tertinggi:

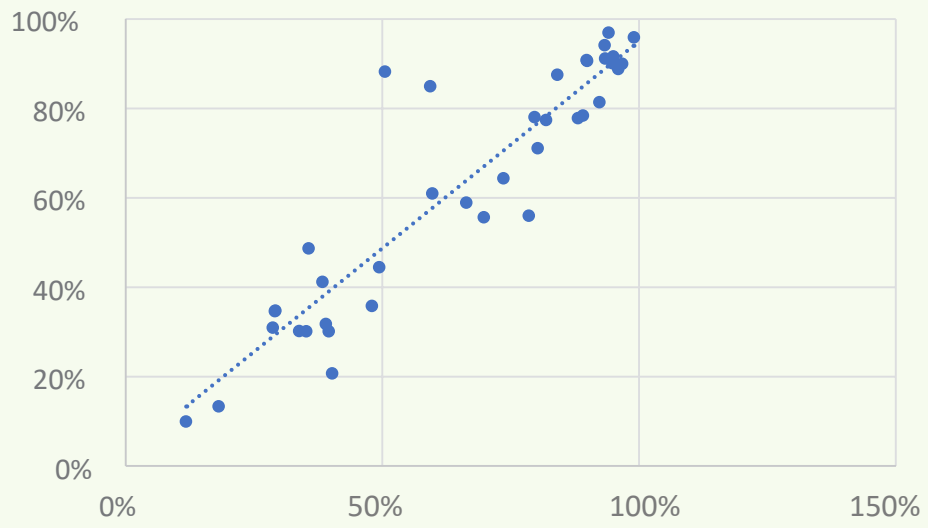
Mekanisme pengungkapan informasi sesuai dengan standar *Global Reporting Initiative* (GRI), serta mematuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Salah satu aspek penting dalam proses ini adalah penulisan topik utama dan penentuan materialitas yang dilakukan harus melalui keterlibatan pemangku kepentingan.

Supplier Code of Conduct (G5)
43%

Nilai Pengungkapan Terendah:

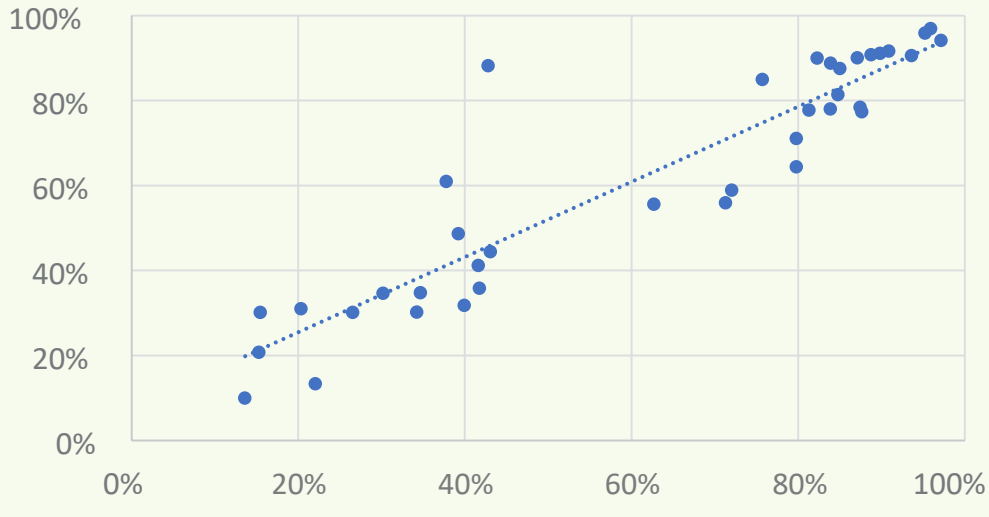
Kebijakan perusahaan terkait pihak ketiga seperti pemasok, vendor, dan mitra bisnis lainnya, merupakan bagian integral dalam memastikan bahwa seluruh rantai pasokan dan operasional bisnis telah mematuhi standar yang tinggi khususnya terkait isu sosial, lingkungan, dan tata kelola.

Hubungan Pengungkapan Lingkungan dan Tata Kelola 38 Perusahaan Emiten LQ45



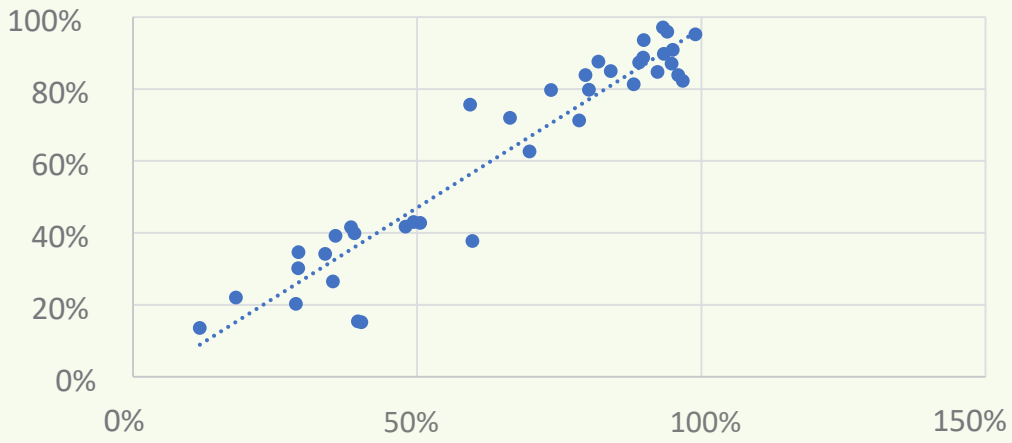
Berdasarkan *scatter plot* di atas, menunjukkan hubungan antara variabel *environment* dan *government* pada masing-masing emiten saham. Dari *trendline* ditunjukan hubungan positif antara kedua variabel, dimana semakin meningkatnya tingkat *environment,* juga diikuti dengan meningkatnya tingkat *government* nya. Kemudian apabila dilihat dari nilai koefisiennya yakni 92,62% menunjukkan pengaruh variabel *environment* sebesar 92,62% terhadap variabel *government*.

Hubungan Pengungkapan Sosial dan Tata Kelola 38 Perusahaan Emiten LQ45



Berdasarkan *scatter plot* di atas, menunjukkan hubungan antara variabel *social* dan *government* pada masing-masing emiten saham. Dari *trendline* ditunjukan hubungan positif antara kedua variabel, dimana semakin meningkatnya tingkat *social,* juga diikuti dengan meningkatnya tingkat *government* nya. Kemudian apabila dilihat dari nilai koefisen nya yakni 88,56% menunjukkan pengaruh variabel social sebesar 88,56% terhadap variabel *government*.

Hubungan Pengungkapan Lingkungan dan Sosial 38 Perusahaan Emiten LQ45



Berdasarkan *scatter plot* di atas, menunjukan hubungan antara variabel *environment* dan *social* pada masing-masing emiten saham. Dari *trendline* ditunjukan hubungan positif antara kedua variabel, dimana semakin meningkatnya tingkat *environment*, juga diikuti dengan meningkatnya tingkat *social* nya. Kemudian apabila dilihat dari nilai koefisen nya yakni 99,65% menunjukan pengaruh variabel *social* sebesar 99,65% terhadap variabel *environment*.

Skor Pengungkapan LST 148 Perusahaan Nasional

Kode Saham	Perusahaan	Climate Change	Natural Resources	Polution and Waste	Opportunities and Policy	Human Capital	Relations	Corporate Governance	Corporate Behavior	Product Responsibility	Total ESG Disclosure
ITMG	PT Indo Tambangraya Megah Tbk	100%	98%	100%	99%	96%	89%	100%	93%	90%	**97%**
ABMM	PT ABM Investama Tbk	100%	96%	87%	94%	95%	93%	100%	98%	100%	**96%**
PTBA	PT Bukit Asam Tbk	95%	96%	87%	94%	96%	90%	98%	96%	95%	**96%**
BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	100%	100%	87%	85%	97%	99%	87%	100%	100%	**95%**
TINS	PT Timah Tbk	95%	96%	97%	94%	93%	95%	91%	97%	98%	**94%**
ANTM	PT Aneka Tambang Tbk	100%	98%	86%	92%	91%	93%	97%	86%	95%	**92%**
PGEO	PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	95%	96%	87%	92%	89%	94%	90%	91%	98%	**91%**
BBTN	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	100%	86%	99%	87%	93%	95%	94%	86%	100%	**91%**
WTON	PT Wijaya Karya Beton Tbk	100%	96%	99%	90%	93%	97%	87%	85%	83%	**91%**
BMRI	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	100%	96%	100%	90%	86%	98%	81%	98%	100%	**91%**
BJBR	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	100%	96%	100%	90%	87%	81%	87%	88%	100%	**90%**
BBNI	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	95%	80%	99%	94%	88%	95%	96%	84%	100%	**90%**
INCO	PT Vale Indonesia Tbk	100%	96%	97%	96%	82%	90%	82%	97%	95%	**90%**
PGAS	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	95%	96%	100%	95%	83%	93%	81%	96%	93%	**90%**
POWR	PT Cikarang Listrindo Tbk	95%	100%	100%	97%	82%	89%	94%	78%	45%	**88%**
ASII	PT Astra International Tbk	100%	96%	86%	86%	84%	95%	76%	83%	100%	**86%**
ISAT	PT Indosat Tbk	76%	73%	99%	96%	84%	91%	88%	86%	95%	**86%**
ANJT	PT Austindo Nusantara Jaya Tbk	100%	86%	86%	92%	88%	96%	100%	66%	0%	**85%**
BUMI	PT Bumi Resources Tbk	91%	83%	87%	95%	87%	92%	88%	85%	0%	**85%**
WEGE	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	95%	96%	100%	96%	81%	97%	80%	85%	0%	**85%**
INDY	PT Indika Energy Tbk	100%	88%	87%	91%	87%	98%	74%	84%	0%	**83%**

Kode Saham	Perusahaan	Climate Change	Natural Resources	Polution and Waste	Opportunities and Policy	Human Capital	Relations	Corporate Governance	Corporate Behavior	Product Responsibility	Total ESG Disclosure
UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk	95%	89%	99%	81%	81%	84%	78%	77%	79%	**82%**
MBMA	PT Merdeka Battery Materials Tbk	86%	85%	79%	77%	90%	67%	82%	79%	45%	**82%**
MEDC	PT Medco Energi Internasional Tbk	93%	74%	62%	83%	83%	93%	69%	96%	38%	**81%**
BTPN	PT Bank BTPN Tbk /Bank SMBC Indonesia	92%	81%	32%	69%	75%	84%	75%	100%	95%	**79%**
CITA	PT Cita Mineral Investindo Tbk	95%	72%	87%	88%	85%	88%	77%	73%	0%	**79%**
BRIS	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	95%	73%	79%	83%	69%	98%	71%	85%	100%	**78%**
MDKA	PT Merdeka Copper Gold Tbk	74%	79%	74%	86%	78%	93%	75%	81%	0%	**77%**
WIKA	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	100%	97%	87%	71%	62%	61%	84%	85%	0%	**75%**
GIAA	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	92%	62%	33%	83%	65%	72%	71%	95%	100%	**74%**
PTRO	PT Petrosea Tbk	86%	84%	63%	85%	76%	84%	57%	80%	0%	**74%**
EMTK	PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	68%	42%	33%	79%	74%	91%	74%	93%	100%	**73%**
JSMR	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	95%	71%	33%	93%	66%	86%	72%	84%	0%	**73%**
INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	89%	63%	87%	73%	81%	68%	83%	59%	0%	**73%**
SMCB	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	81%	86%	58%	70%	70%	55%	53%	76%	90%	**70%**
BJTM	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	95%	71%	32%	69%	57%	9%	81%	95%	100%	**71%**
BRMS	PT Bumi Resources Minerals Tbk	70%	78%	46%	75%	77%	36%	70%	76%	0%	**71%**
NCKL	PT Trimegah Bangun Persada Tbk	95%	60%	87%	87%	70%	89%	37%	86%	0%	**69%**
BNGA	PT Bank CIMB Niaga Tbk	89%	75%	67%	74%	52%	75%	50%	86%	100%	**67%**
DEWA	PT Darma Henwa Tbk	64%	53%	74%	68%	82%	82%	54%	68%	0%	**67%**
TOWR	PT Sarana Menara Nusantara Tbk	70%	56%	47%	80%	69%	100%	55%	65%	45%	**66%**
SIDO	PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk	87%	80%	61%	83%	73%	84%	62%	70%	0%	**71%**
DSSA	PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	78%	60%	55%	79%	59%	96%	56%	67%	0%	**63%**

Kode Saham	Perusahaan	Climate Change	Natural Resources	Polution and Waste	Opportunities and Policy	Human Capital	Relations	Corporate Governance	Corporate Behavior	Product Responsibility	Total ESG Disclosure
TLKM	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	83%	18%	32%	71%	47%	0%	90%	84%	100%	**61%**
DSNG	PT Dharma Satya Nusantara Tbk	56%	61%	35%	77%	57%	52%	47%	76%	0%	**59%**
PTPP	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	82%	64%	49%	72%	55%	16%	51%	68%	0%	**58%**
BBCA	PT Bank Central Asia Tbk	27%	45%	87%	84%	32%	97%	28%	86%	100%	**53%**
BDMN	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	74%	63%	33%	62%	33%	38%	36%	69%	100%	**51%**
TBIG	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	74%	61%	34%	49%	41%	21%	39%	69%	0%	**48%**
ADMR	PT Adaro Minerals Indonesia Tbk	50%	48%	50%	51%	43%	45%	49%	49%	0%	**46%**
TOBA	PT TBS Energi Utama Tbk	48%	43%	53%	49%	40%	49%	47%	49%	48%	**45%**
TPIA	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	80%	48%	39%	47%	44%	42%	39%	38%	46%	**45%**
AALI	PT Astra Agro Lestari Tbk	50%	47%	42%	47%	42%	42%	45%	42%	25%	**43%**
SMGR	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	47%	48%	46%	49%	41%	51%	45%	34%	0%	**42%**
GOTO	PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	34%	27%	50%	41%	43%	0%	24%	63%	97%	**41%**
EXCL	PT XL Axiata Tbk	42%	29%	43%	44%	43%	24%	35%	46%	48%	**40%**
DOID	PT Delta Dunia Makmur Tbk	43%	42%	35%	37%	40%	35%	45%	37%	45%	**40%**
SSMS	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	33%	47%	38%	44%	43%	55%	39%	36%	0%	**40%**
ELSA	PT Elnusa Tbk	42%	30%	43%	44%	39%	52%	40%	47%	0%	**39%**
BIRD	PT Blue Bird Tbk	48%	45%	27%	43%	42%	17%	23%	39%	0%	**37%**
ADRO	PT Adaro Energy Indonesia Tbk / PT Alamtri Resources Indonesia Tbk	42%	37%	24%	43%	40%	35%	34%	36%	0%	**37%**
STAA	PT Sumber Tani Agung Resources Tbk	48%	37%	43%	44%	33%	23%	36%	42%	0%	**36%**
JAWA	PT Jaya Agra Wattie Tbk	42%	40%	29%	30%	37%	25%	36%	33%	48%	**36%**
PSGO	PT Palma Serasih Tbk	48%	35%	33%	48%	30%	19%	26%	39%	0%	**34%**
INTP	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	48%	39%	43%	49%	22%	19%	33%	40%	0%	**33%**

Kode Saham	Perusahaan	Climate Change	Natural Resources	Polution and Waste	Opportunities and Policy	Human Capital	Relations	Corporate Governance	Corporate Behavior	Product Responsibility	Total ESG Disclosure
JPFA	PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk	39%	14%	33%	38%	35%	28%	40%	36%	0%	**33%**
AKRA	PT AKR Corporindo Tbk	37%	28%	23%	40%	34%	36%	26%	31%	46%	**33%**
INPC	PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	19%	31%	17%	43%	30%	0%	37%	37%	50%	**33%**
SMRA	PT Summarecon Agung Tbk	45%	40%	40%	41%	27%	36%	27%	36%	0%	**33%**
BNII	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	38%	29%	17%	35%	32%	14%	30%	34%	48%	**32%**
MEGA	PT Bank Mega Tbk	38%	35%	33%	38%	28%	18%	22%	42%	25%	**31%**
SCMA	PT Surya Citra Media Tbk	31%	21%	23%	37%	29%	40%	32%	39%	25%	**31%**
PWON	PT Pakuwon Jati Tbk	41%	42%	35%	36%	30%	1%	29%	31%	0%	**31%**
BSDE	PT Bumi Serpong Damai Tbk	29%	26%	33%	40%	28%	42%	27%	35%	46%	**31%**
HRUM	PT Harum Energy Tbk	31%	23%	22%	37%	39%	5%	26%	31%	25%	**31%**
PJAA	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk	39%	35%	26%	42%	30%	41%	16%	39%	0%	**31%**
ADHI	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	48%	33%	50%	38%	22%	47%	24%	42%	0%	**31%**
TAPG	PT Triputra Agro Persada Tbk	33%	32%	36%	36%	32%	50%	28%	28%	0%	**31%**
ARCI	PT Archi Indonesia Tbk	36%	28%	20%	39%	36%	23%	25%	31%	0%	**31%**
AMRT	PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	42%	29%	26%	40%	28%	8%	30%	37%	0%	**31%**
LPKR	PT Lippo Karawaci Tbk	37%	25%	28%	34%	29%	9%	35%	32%	27%	**30%**
BTPS	PT Bank BTPN Syariah Tbk	32%	29%	16%	31%	30%	32%	27%	32%	48%	**30%**
META	PT Nusantara Infrastructure Tbk	34%	34%	33%	40%	32%	13%	11%	39%	0%	**30%**
BANK	PT Bank Aladin Syariah Tbk	35%	14%	31%	28%	31%	23%	35%	30%	48%	**30%**
KAEF	PT Kimia Farma Tbk	14%	20%	43%	30%	29%	51%	29%	42%	0%	**29%**
MERK	PT Merck Tbk	28%	24%	23%	27%	32%	11%	34%	28%	48%	**29%**
INPP	PT Indonesian Paradise Property Tbk	32%	22%	20%	26%	29%	36%	28%	33%	50%	**29%**
AGII	PT Samator Indo Gas Tbk	30%	29%	19%	25%	34%	27%	22%	37%	0%	**29%**
SRTG	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	44%	0%	16%	41%	24%	49%	28%	39%	46%	**28%**

Kode Saham	Perusahaan	Climate Change	Natural Resources	Polution and Waste	Opportunities and Policy	Human Capital	Relations	Corporate Governance	Corporate Behavior	Product Responsibility	Total ESG Disclosure
KLBF	PT Kalbe Farma Tbk	45%	37%	43%	38%	16%	11%	20%	37%	48%	**28%**
CRSN	PT Carsurin Tbk	39%	28%	10%	40%	29%	8%	22%	33%	0%	**28%**
NISP	PT Bank OCBC NISP Tbk	37%	29%	15%	23%	33%	32%	24%	29%	8%	**28%**
IPCM	PT Jasa Armada Indonesia Tbk	17%	16%	16%	34%	33%	29%	23%	35%	0%	**27%**
TOTL	PT Total Bangun Persada Tbk	0%	32%	18%	33%	27%	44%	16%	35%	48%	**27%**
ARTO	PT Bank Jago Tbk	33%	15%	15%	26%	31%	9%	27%	27%	46%	**27%**
ACES	PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk	29%	21%	16%	39%	21%	15%	35%	33%	0%	**27%**
ASGR	PT Astra Graphia Tbk	6%	7%	26%	35%	27%	16%	28%	36%	46%	**26%**
UNTR	PT United Tractors Tbk	42%	34%	43%	45%	16%	7%	15%	31%	0%	**25%**
LPIN	PT Multi Prima Sejahtera Tbk	6%	5%	27%	33%	30%	27%	31%	33%	0%	**25%**
AGRO	PT Bank Raya Indonesia Tbk	3%	35%	17%	32%	22%	32%	18%	33%	0%	**24%**
KRAS	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	25%	20%	22%	28%	24%	16%	19%	27%	0%	**23%**
BRAM	PT Indo Kordsa Tbk	36%	17%	26%	22%	22%	6%	20%	25%	45%	**23%**
PPRO	PT PP Properti Tbk	48%	0%	43%	35%	17%	2%	28%	29%	0%	**22%**
PSSI	PT IMC Pelita Logistik Tbk	29%	23%	20%	28%	22%	11%	17%	27%	0%	**22%**
MYOR	PT Mayora Indah Tbk	31%	25%	21%	25%	17%	23%	21%	29%	0%	**22%**
ISSP	PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk	0%	29%	23%	25%	23%	27%	12%	29%	0%	**21%**
PNBN	PT Bank Pan Indonesia Tbk	0%	0%	7%	35%	20%	55%	30%	20%	49%	**21%**
IBST	PT Inti Bangun Sejahtera Tbk	0%	3%	16%	25%	26%	0%	25%	31%	0%	**20%**
ADMF	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	5%	17%	16%	23%	22%	14%	19%	29%	0%	**20%**
BTON	PT Betonjaya Manunggal Tbk	23%	23%	19%	20%	16%	1%	16%	27%	45%	**20%**
LPLI	PT Star Pasific Tbk	22%	10%	20%	27%	20%	18%	16%	26%	0%	**20%**
COCO	PT Wahana Interfood Nusantara Tbk	0%	21%	16%	9%	27%	0%	20%	20%	0%	**18%**
MAYA	PT Bank Mayapada Internasional Tbk	0%	0%	7%	25%	12%	9%	22%	39%	50%	**18%**

Kode Saham	Perusahaan	Climate Change	Natural Resources	Polution and Waste	Opportunities and Policy	Human Capital	Relations	Corporate Governance	Corporate Behavior	Product Responsibility	Total ESG Disclosure
CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	6%	16%	18%	27%	23%	13%	6%	23%	0%	**18%**
CSRA	PT Cisadane Sawit Raya Tbk	15%	10%	18%	34%	12%	13%	22%	24%	0%	**18%**
IPCC	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	6%	3%	16%	35%	17%	2%	16%	31%	0%	**18%**
BUKA	PT Bukalapak.com Tbk	5%	5%	15%	24%	12%	11%	19%	27%	46%	**17%**
WSKT	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	0%	8%	20%	28%	12%	35%	9%	36%	0%	**16%**
HMSP	PT HM Sampoerna Tbk	18%	15%	19%	23%	11%	9%	16%	20%	0%	**15%**
INAF	PT Indofarma Tbk	0%	17%	26%	6%	12%	0%	8%	24%	0%	**12%**
AMMN	PT Amman Mineral Internasional Tbk	1%	12%	14%	16%	15%	2%	10%	12%	0%	**12%**
KEEN	PT Kencana Energi Lestari Tbk	2%	4%	10%	20%	11%	18%	9%	17%	0%	**11%**
BBMD	PT Bank Mestika Dharma Tbk	0%	5%	16%	11%	8%	5%	4%	28%	21%	**10%**
ADES	PT Akasha Wira International Tbk	1%	5%	16%	8%	11%	10%	8%	23%	0%	**10%**
BEKS	PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	2%	6%	13%	4%	8%	14%	6%	10%	25%	**8%**
Private Company	PT Pertamina (Persero)	95%	99%	100%	98%	96%	91%	100%	99%	48%	**96%**
Private Company	PT Pupuk Kalimantan Timur	97%	96%	86%	95%	95%	94%	96%	96%	79%	**95%**
Private Company	PT Pupuk Indonesia (Persero)	95%	96%	100%	96%	94%	96%	100%	99%	50%	**95%**
Private Company	PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)	100%	96%	87%	92%	93%	99%	100%	84%	0%	**91%**
Private Company	PT Kilang Pertamina Internasional	95%	96%	87%	95%	83%	91%	97%	97%	0%	**89%**
Private Company	PT Indonesia Asahan Aluminium	90%	86%	78%	85%	87%	92%	84%	95%	93%	**88%**
Private Company	PT Perkebunan Nusantara I (Persero)	95%	96%	86%	92%	80%	91%	99%	86%	0%	**86%**
Private Company	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	100%	96%	87%	92%	83%	98%	99%	84%	50%	**89%**
Private Company	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	100%	87%	92%	91%	75%	95%	80%	94%	95%	**85%**
Private Company	PT PLN Nusantara Power	95%	96%	87%	93%	73%	96%	81%	84%	0%	**81%**

Kode Saham	Perusahaan	Climate Change	Natural Resources	Polution and Waste	Opportunities and Policy	Human Capital	Relations	Corporate Governance	Corporate Behavior	Product Responsibility	Total ESG Disclosure
Private Company	PT PLN Indonesia Power	95%	96%	87%	94%	70%	94%	66%	84%	0%	**78%**
Private Company	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	85%	77%	57%	82%	75%	81%	73%	76%	93%	**77%**
Private Company	PT Angkasa Pura Indonesia (Persero)	60%	76%	63%	66%	79%	89%	73%	94%	0%	**75%**
Private Company	PT Hutama Karya (Persero)	48%	38%	50%	48%	40%	51%	46%	46%	25%	**43%**
Private Company	PT Perum Peruri (Persero)	41%	44%	37%	44%	41%	28%	34%	37%	49%	**40%**
Private Company	PT Federal International Finance	42%	25%	43%	38%	26%	39%	27%	43%	48%	**33%**
Private Company	PT Pegadaian (Persero)	38%	30%	16%	29%	37%	13%	28%	36%	39%	**32%**
Private Company	Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	39%	28%	21%	31%	33%	21%	25%	35%	0%	**30%**
Private Company	PT Permodalan Nasional Madani	35%	27%	16%	35%	28%	32%	21%	34%	0%	**28%**
Private Company	PT Prudential Life Assurance	36%	28%	18%	25%	21%	14%	23%	32%	46%	**26%**
Private Company	PT Asuransi Jasa Indonesia	34%	3%	18%	28%	28%	24%	11%	33%	0%	**22%**
Private Company	Bank Aceh Syariah	0%	9%	17%	30%	21%	13%	15%	30%	47%	**20%**
Private Company	PT Bank DKI	0%	0%	17%	19%	24%	24%	15%	23%	48%	18%

Keterangan

	Leadership AAA	91	-	100
	Leadership AA	81	-	90
	Leadership A	71	-	80
	Management BBB	61	-	70
	Management BB	51	-	60
	Management B	41	-	50
	Commitment CCC	31	-	40
	Commitment CC	21	-	30
	Commitment C	11	-	20
	Awareness	0	-	10





Penjelasan

Berdasarkan tabel di atas, dari total 148 perusahaan terdapat 23 perusahaan non-emiten. Pada perusahaan non-emiten, tingkat pengungkapan tertinggi ada pada topik *Climate Change* dan *Corporate Behavior. Climate Change* menjadi bagian penting dalam pengungkapan laporan keberlanjutan, terutama terkait penggunaan energi, emisi gas rumah kaca, efisiensi sumber daya, serta strategi perusahaan dalam menghadapi risiko perubahan iklim. Perusahaan yang menyusun laporan keberlanjutan secara konsisten diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kebijakan, program, dan pencapaian yang berkaitan dengan pengelolaan perubahan iklim.

Pengelolaan perubahan iklim memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan operasional dan ketahanan bisnis perusahaan. Melalui berbagai inisiatif, seperti efisiensi energi, pengurangan emisi, penggunaan sumber energi yang lebih ramah lingkungan, pengelolaan limbah, serta pengurangan konsumsi sumber daya, perusahaan dapat mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas bisnisnya. Selain memberikan manfaat bagi lingkungan, upaya tersebut juga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan membantu perusahaan menghadapi risiko yang timbul akibat perubahan iklim.

Selain itu, tanggung jawab perusahaan terhadap perubahan iklim tidak hanya berkaitan dengan kepentingan bisnis, tetapi juga mencakup tanggung jawab kepada masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Komitmen tersebut dapat diwujudkan melalui penetapan target pengurangan emisi, pemantauan konsumsi energi, pengembangan inovasi rendah karbon, serta transparansi dalam pengungkapan kinerja lingkungan.

Adapun dalam aspek *Corporate Behavior*, isu anti-korupsi menjadi salah satu perhatian utama yang dibahas secara intensif oleh perusahaan. Kesadaran terhadap potensi risiko kecurangan dan kerugian akibat praktik korupsi mendorong banyak perusahaan untuk mengadopsi kebijakan pencegahan yang lebih ketat dan proaktif. Langkah-langkah seperti penerapan program pelatihan anti-korupsi, pembuatan kebijakan etika bisnis, dan pembentukan unit khusus yang menangani pengawasan dan audit internal sering kali diterapkan sebagai bagian dari upaya ini.

Pencegahan korupsi menjadi prioritas di setiap lini perusahaan, karena risiko yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga dapat mencakup hilangnya kepercayaan publik, kerusakan reputasi perusahaan, potensi sanksi hukum yang berat, dan dapat berdampak pada stabilitas operasional perusahaan serta kemampuannya untuk bersaing di pasar.

Dengan adanya implementasi kebijakan anti-korupsi yang kuat, mencerminkan komitmen perusahaan untuk menjalankan operasional bisnis secara transparan, akuntabel, dan etis. Komitmen ini diwujudkan melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik, yang mencakup penyusunan kebijakan anti-korupsi secara komprehensif dan penerapan mekanisme pengawasan internal yang ketat. Salah satu inisiatif yang telah banyak dilakukan adalah penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), yang memungkinkan pemangku kepentingan, seperti baik karyawan, mitra bisnis, maupun pihak eksternal dapat melaporkan tindakan atau aktivitas yang berpotensi melibatkan korupsi maupun pelanggaran kode etik.

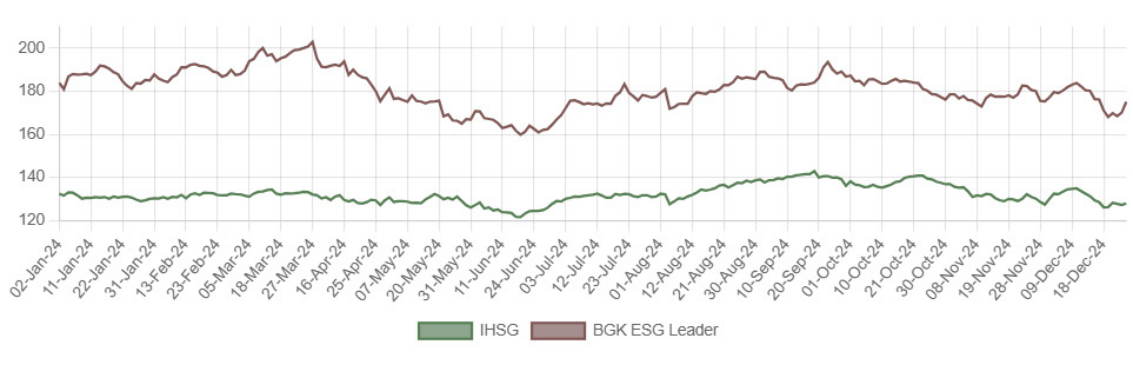
Whistleblowing system dirancang untuk memastikan bahwa setiap laporan yang masuk ditindaklanjuti secara objektif, rahasia, dan profesional. Dengan adanya mekanisme ini, perusahaan tidak hanya dapat mendeteksi dan mencegah korupsi lebih dini, tetapi juga membangun kepercayaan pemangku kepentingan terhadap integritas perusahaan. Sistem ini menjadi elemen penting dalam tata kelola perusahaan karena mendukung terciptanya lingkungan kerja yang jujur, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi yang merusak reputasi maupun keberlanjutan bisnis.

Untuk memastikan efektivitas upaya pencegahan kecurangan, setiap perusahaan perlu mengimplementasikan sistem pengendalian internal secara konsisten di semua lini operasional. Selain itu, harus adanya komunikasi dan pelatihan yang terarah, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada seluruh karyawan mengenai berbagai risiko kecurangan, cara mendeteksinya, dan tindakan pencegahan yang dapat diambil. Dengan adanya pendekatan ini, perusahaan dapat membangun kesadaran dan memperkuat kemampuan karyawan dalam menjaga integritas di setiap proses bisnis.



INDEKS ESG BGK FOUNDATION (ESG LEADER)

Grafik IHSG VS ESG Leader



Catatan:

- IHSG adalah indeks harga saham gabungan.
- ESG Leader adalah Indeks BGK Foundation yang terdiri dari 3 perusahaan terbuka dalam LQ45 yang memiliki nilai total ESG tertinggi.

ESG Leader

EMITEN	SKOR PENGUNGKAPAN LST
ITMG PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK	97%
PTBA PT BUKIT ASAM TBK	96%
BBRI PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	95%

Pemetaan LST dan SDGs

125 Perusahaan Emiten

Entitas	ESG		Rata-Rata ESG	Komponen ESG			SDG's
125 Emiten	48%	Environmental	49%	Climate Change	E1 GHG Emissions	44%	
					E2 Emissions Intensity	59%	
				Natural Resources	E3 Energy Usage	40%	
					E4 Energy Intensity	57%	
					E5 Energy Mix	41%	
					E6 Water Usage	44%	
				Pollution and Waste	E7 Environmental Operations	45%	
				Opportunities and Policy	E8 Climate Oversight /Board	58%	
					E9 Climate Oversight / Management	58%	
					E10 Climate Risk Mitigation	59%	
					E11 Forestry CSR	37%	
		Social	46%	Human Capital	S1 CEO Pay Ratio	53%	
					S2 Gender Pay Ratio	47%	
					S3 Employee Turnover	56%	
					S4 Gender Diversity	45%	
					S5 Temporary Worker Ratio	50%	
					S6 Non-Discrimination	46%	
					S7 Injury Rate	42%	
					S8 Global Health and Safety	50%	
					S9 Child and forced labor	47%	
					S10 Human Rights	27%	
				Relations	S11 Social CSR	45%	

Entitas	ESG	Rata-Rata ESG	Komponen ESG			SDG's
	Governance	47%	Corporate Governance	G1 Board Diversity	52%	    
				G2 Board Independence	53%	
				G3 Incentivized Pay	49%	
				G4 Collective Bargaining	40%	
				G5 Supplier Code of Conduct	29%	
			Corporate Behaviour	G6 Ethics & Anti Corruption	43%	
				G8 ESG Reporting	33%	
				G9 Disclosure Practices	62%	
				G10 External Assurance	68%	
				G11 Tax Transparency	59%	
			Product Responsibility	G7 Data Privacy	32%	

38 Perusahaan Emiten LQ45

Entitas		ESG	Rata-Rata ESG	Komponen ESG			SDG's
38 Emiten LQ45	63%	Environmental	65%	Climate Change	E1 GHG Emissions	61%	
					E2 Emissions Intensity	75%	
				Natural Resources	E3 Energy Usage	54%	
					E4 Energy Intensity	73%	
					E5 Energy Mix	54%	
					E6 Water Usage	58%	
				Pollution and Waste	E7 Environmental Operations	63%	
				Opportunities and Policy	E8 Climate Oversight /Board	73%	
					E9 Climate Oversight / Management	73%	
					E10 Climate Risk Mitigation	76%	
					E11 Forestry CSR	55%	
		Social	62%	Human Capital	S1 CEO Pay Ratio	62%	
					S2 Gender Pay Ratio	65%	
					S3 Employee Turnover	68%	
					S4 Gender Diversity	59%	
					S5 Temporary Worker Ratio	64%	
					S6 Non-Discrimination	64%	
					S7 Injury Rate	59%	
					S8 Global Health and Safety	69%	
					S9 Child and forced labor	66%	
					S10 Human Rights	40%	
				Relations	S11 Social CSR	63%	

Entitas	ESG	Rata-Rata ESG	Komponen ESG			SDG's
	Governance	63%	Corporate Governance	G1 Board Diversity	67%	    
				G2 Board Independence	66%	
				G3 Incentivized Pay	64%	
				G4 Collective Bargaining	62%	
				G5 Supplier Code of Conduct	43%	
			Corporate Behaviour	G6 Ethics & Anti Corruption	55%	
				G8 ESG Reporting	51%	
				G9 Disclosure Practices	77%	
				G10 External Assurance	82%	
				G11 Tax Transparency	79%	
			Product Responsibility	G7 Data Privacy	45%	





REKOMENDASI

Rekomendasi untuk Emiten



Keterlibatan Dewan Pimpinan

Dewan pimpinan perusahaan bertanggung jawab untuk memuat isu-isu LST dalam strategi bisnis perusahaan. Beberapa pihak (seperti para investor) mengharapkan dewan pimpinan untuk terlibat dan mengerti secara mendalam segala risiko, kendala dan peluang yang berhubungan dengan LST, dan merencanakan sistem pengendalian atau mitigasi risiko yang sesuai. Perusahaan dapat menunjukkan keterlibatan dewan pimpinan dalam isu LST melalui pendirian Badan Tata Kelola Tertinggi atau Direktur LST & *Sustainability* pada struktur organisasi perusahaan.

Sustainability Blueprint merupakan kerangka bagi perusahaan dalam menjalankan inisiatif dan target LST selanjutnya, yang terdiri dari strategi, kebijakan, dan roadmap keberlanjutan. Dengan adanya kerangka ini, perusahaan telah menentukan sejak awal arah LST kedepan baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dari sini akan terlihat target-target yang ingin dicapai perusahaan beserta strategi dalam mencapai target tersebut. Kerangka ini mendukung kinerja yang lebih terstruktur dan tepat sasaran sesuai dengan visi dan misi LST perusahan.



Penyusunan *Sustainability Blueprint*



Pengungkapan terkait Emisi Gas Rumah Kaca

Sebagai bentuk kontribusi terhadap komitmen pemerintah Indonesia dalam pencapaian *Nationally Determined Contribution* yaitu penurunan emisi nasional sebesar 29% pada 2030 yang diungkapkan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2016 terkait Pengesahan Perjanjian Paris. Perusahaan perlu memperhatikan isu ini dengan melakukan pengungkapan perhitungan emisi yang dihasilkan dari operasional perusahaan dalam laporan keberlanjutan. Perhitungan emisi tersebut juga perlu memperhatikan lingkup emisi yaitu *scope* 1, 2, dan 3.

Selain mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 51/POJK.03/2017, Surat Edaran OJK nomor 16/SEOJK.04/2021, dan mengadopsi standar pelaporan laporan keberlanjutan seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) *Standard*, perusahaan juga perlu mengacu pada kerangka *Carbon Disclosure Project* (CDP), *Sustainability Accounting Standard Board* (SASB), dan *International Sustainability Standards Board* IFRS S1 S2.



Penggunaan Standar Pelaporan Laporan Keberlanjutan



Proses *Assurance* Melalui Pihak Ketiga Independen

Proses *assurance* sebaiknya dilakukan dalam proses penyusunan laporan keberlanjutan periode selanjutnya. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pengungkapan informasi LST yang telah dilakukan perusahaan secara terukur, akurat, kredibel, dan objektif. Assurance report akan menambah kredibilitas perusahaan di mata pemangku kepentingan. Adapun standar internasional yang digunakan dalam proses *assurance* seperti AA1000 dan ISAE3000.

Artinya perusahaan dapat memilih untuk mematuhi (dan mengungkapkan faktor LST yang relevan untuk ketentuan tersebut) atau menjelaskan mengenai alasan informasi tersebut tidak diungkapkan. Kami menemukan beberapa perusahaan yang tidak menjelaskan alasan pendukung dari keputusan untuk tidak mengungkapkan topik LST tersebut. Kami juga menemukan bahwa sebenarnya beberapa ketentuan dari faktor LST telah banyak dipraktikkan oleh perusahaan dalam operasi bisnis, namun tidak diungkapkan di dalam laporan keberlanjutan sehingga berpengaruh terhadap nilai pengungkapan LST mereka.



"Patuhi, Jika Tidak Jelaskan Alasan"



Membuat Strategi untuk Mengurangi Jejak Ekologis

Salah satu cara untuk mengurangi jejak ekologis suatu organisasi adalah dengan menerapkan langkah-langkah efisiensi energi. Hal ini dapat mencakup berbagai cara, mulai dari penggunaan bahan daur ulang hingga peningkatan ke peralatan yang lebih efisien. Dengan mengurangi jumlah energi yang digunakan, organisasi tidak hanya dapat menghemat uang namun juga membantu mengurangi emisi. Selain itu, mendorong praktik berkelanjutan di kalangan karyawan adalah langkah penting lainnya, seperti melalui pelatihan mengenai topik daur ulang, konservasi energi, atau penerapan kebijakan yang mendorong perilaku berkelanjutan. Dengan mempromosikan keberlanjutan di tempat kerja, organisasi dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan.

Salah satu cara dalam mengurangi dampak lingkungan adalah dengan melakukan audit terhadap penggunaan energi dalam organisasi. Proses ini melibatkan analisis mendalam tentang bagaimana energi digunakan dan identifikasi peluang untuk perbaikan. Misalnya, memberikan rekomendasi peralihan kepenerangan hemat energi atau memasang panel surya. Implementasi atas rekomendasi tersebut tidak hanya membantu perusahaan menghemat biaya energi, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan jejak karbon dan dampak negatif terhadap lingkungan.



Melakukan Audit terhadap Penggunaan Energi



Rekomendasi untuk Regulator Pasar Modal

Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk regulator Pasar Modal di Indonesia dalam menjalankan peraturan berbasis ESG (*Environmental, Social, and Governance*):

1. Peningkatan Literasi dan Kesadaran ESG: Regulator dapat mengadakan program edukasi untuk meningkatkan pemahaman pelaku pasar modal tentang pentingnya ESG. Hal ini dapat mencakup seminar, pelatihan, dan publikasi panduan.
2. Penerapan Standar dan Taksonomi ESG: Mengembangkan taksonomi hijau yang jelas dan terstandar untuk membantu pelaku pasar memahami kategori investasi berkelanjutan. OJK telah mulai menyusun taksonomi berkelanjutan Indonesia yang dapat menjadi acuan.
3. Insentif untuk Investasi Berkelanjutan: Memberikan insentif kepada perusahaan yang menerapkan prinsip ESG, seperti pengurangan biaya administrasi atau akses ke pendanaan dengan bunga rendah.
4. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Memastikan kepatuhan terhadap peraturan ESG melalui pengawasan yang ketat dan sanksi bagi pelanggaran. Peraturan seperti POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang penerbitan efek berlandaskan keberlanjutan dapat menjadi dasar.
5. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan: Melibatkan berbagai pihak, termasuk perusahaan, investor, dan masyarakat, untuk mendukung penerapan ESG secara menyeluruh.
6. Transparansi dan Pelaporan: Mewajibkan perusahaan untuk menyampaikan laporan keberlanjutan yang mencakup aspek ESG, seperti yang diatur dalam Peraturan OJK No. 51 Tahun 2017.
7. OJK dan Bursa Efek Indonesia perlu mewajibkan emiten untuk memberikan pelatihan terkait LST bagi Direksi minimal satu kali.

8. OJK dan Bursa Efek Indonesia segera menyusun *roadmap* dalam mewajibkan emiten mengungkapkan topik *board diversity* dan *climate change* pada laporan keberlanjutan. Implementasi pengungkapan topik *board diversity* dapat dilakukan oleh seluruh sektor emiten. Terkait pengungkapan *climate change,* emiten perlu mengadopsi rekomendasi dari *International Sustainability Standards Board* IFRS S1 S2, di mana didalamnya terdapat beberapa komponen seperti strategi, manajemen risiko, tata kelola, serta metrik dan target perubahan iklim. Implementasi pengungkapan ini diwajibkan secara khusus untuk emiten sektor keuangan, pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, hasil hutan, barang konsumen primer, barang konsumen non primer, barang baku, kesehatan, perindustrian, kesehatan, manufaktur, teknologi, pertambangan, energi, transportasi, logistik, properti, infrastruktur, dan bangunan.
9. Ikatan Akuntan Indonesia segera menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terkait emisi gas rumah kaca supaya Nilai Ekonomi Karbon dapat diterapkan secara akuntabel dan kredibel di perusahaan.
10. Kode Etik Lembaga *rating* menurut organisasi pasar modal dunia, diantaranya adalah: Pertama, Transparansi Lembaga *rating* LST dan persepsi pasar terhadap Lembaga *rating* LST yang harus mendukung transparansi Lembaga *rating* LST tersebut; Kedua, Independensi dan penghindaran benturan kepentingan dari Lembaga *rating* LST dengan klien yang dinilai; dan Ketiga, Kompetisi dalam pasar *rating* LST yang menjamin independensi Lembaga *rating* LST itu sendiri.
11. Regulator harus memberikan daftar Lembaga rating kepada publik yang informasinya dapat diakses oleh publik secara gratis. Hal ini penting bagi investor retail yang tidak memiliki sumber daya untuk melakukan analisis *rating* LST secara independen.
12. Regulator wajib membuat peraturan yang mengatur insentif dan hukuman bagi perusahaan yang melakukan *green washing* termasuk Bursa Efek.
13. Regulator wajib memberikan arahan dan insentif bagi perusahaan agar tingkat keterbukaan ESG nya mencapai minimal *score* 70% termasuk Bursa Efek.
14. Semua perusahaan dengan lebih dari 500 karyawan harus mengungkapkan laporan keuangan tahunan mereka dengan mewajibkan perusahaan publik untuk menyediakan pengungkapan ESG serta informasi neraca dan laporan laba rugi dalam laporan tahunan mereka yang harus menjadi undang-undang pada tahun 2026. Petunjuk ini dirancang untuk membantu investor memantau dampak lingkungan dari investasi mereka secara lebih dekat dengan memungkinkan mereka mengakses data yang sebanding di seluruh perusahaan.

Adapun rekomendasi untuk regulator dalam mendukung perusahaan publik (*listed companies*) di Indonesia dalam menjalankan peraturan berbasis ESG (*Environmental, Social, and Governance*):

01

Peningkatan Transparansi dan Pelaporan
Mewajibkan perusahaan untuk menyusun laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang mencakup strategi, kinerja, dan dampak ESG mereka. Hal ini telah diatur dalam [POJK No. 51/2017] dan dapat diperkuat dengan panduan yang lebih rinci.

02

Penyelarasan dengan Standar Internasional
Mendorong perusahaan untuk mengadopsi standar internasional seperti *International Sustainability Standards Board* IFRS S1 S2 atau *Global Reporting Initiative* (GRI) untuk meningkatkan kredibilitas laporan ESG mereka.

03

Insentif untuk Kepatuhan ESG
Memberikan insentif seperti pengurangan pajak atau akses ke pendanaan hijau bagi perusahaan yang menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap prinsip ESG.

04

Pengawasan dan Penegakan Hukum
Memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan ESG dan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak mematuhi peraturan, seperti yang diatur dalam POJK dan surat edaran terkait.

05

Edukasi dan Kesadaran
Mengadakan program pelatihan dan seminar untuk meningkatkan pemahaman perusahaan tentang pentingnya ESG, serta manfaat jangka panjangnya bagi keberlanjutan bisnis.

06

Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan
Melibatkan berbagai pihak, termasuk investor, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, untuk menciptakan ekosistem yang mendukung penerapan ESG.

Langkah-langkah ini dapat membantu menciptakan pasar modal yang lebih berkelanjutan dan mendukung pembangunan ekonomi yang selaras dengan prinsip ESG.





PENUTUP

Secara rata-rata, terjadi perbaikan tingkat keterbukaan total ESG pada tahun 2024 sebesar 49,70% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 46,60%, atau mengalami peningkatan sebesar 3,1%. Peningkatan ini mencerminkan komitmen yang lebih besar dari perusahaan-perusahaan dalam mengadopsi praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Hal ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap standar ESG yang lebih tinggi, tetapi juga mencerminkan upaya kuat guna mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan secara global.

Demikian laporan tahunan BGK Foundation terkait analisa praktik pengungkapan LST perusahaan-perusahaan nasional pada periode 2024 disampaikan. Kami berharap, dengan analisa dan rekomendasi ini setiap perusahaan di Indonesia kedepannya dapat terus meningkatkan dan mengimplementasikan pengungkapan LST sekaligus meningkatkan kinerja LST demi terwujudnya Indonesia yang berkelanjutan. Pengungkapan ESG harus secara jelas mencerminkan tindakan (atau kelambanan) perusahaan dalam beradaptasi dengan perekonomian *net-zero*. Selain itu, pengungkapan ini juga mendorong akuntabilitas tim manajemen yang tidak menunjukkan kemajuan dalam isu-isu LST atau yang menimbulkan dampak negatif melalui operasi bisnis mereka.



BGK
FOUNDATION